



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKjIP**



2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya jualah akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan merupakan masa pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan merupakan program kerja tahun keempat Wali Kota terpilih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan komitmen dan tekad untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

Selanjutnya semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi bagi kinerja DP3AKB, dengan harapan akan menjadi lebih baik, efektif dan efisien, dari seluruh aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaanya, karena tantangan kedepan akan semakin banyak apalagi dengan kondisi Balikpapan sebagai Beranda IKN yang sudah diamanahkan untuk menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan. Semoga bisa menjadi lebih baik.

Balikpapan, 28 Februari 2026
Plt. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

Nursyamsiarni D Larose

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AKB berdasarkan **Renstra tahun 2021-2026** adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender”, dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja salah indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan, dengan sasaran hasil yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya pengarustamaan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Kesertaan PUS ber KB (mCPR).
3. Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang, dan
4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan Tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AKB berdasarkan **Renstra tahun 2025-2029** adalah” Masyarakat yang berdaya dan setara gender”, dengan sasaran rencana strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak
3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
5. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait PUG dalam perencanaan pembangunan dan pentingnya PPRG melalui kegiatan

peningkatan kapasitas SDM perencana selaku Focal Point OPD serta memperkuat peran Perangkat Daerah Penggerak PUG (OPD Driver).

- b. Pelaksanaan pendampingan OPD dalam penyusunan anggaran yang responsive gender.
- c. Memperkuat kemitraan perangkat daerah dengan kelembagaan masyarakat dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perlindungan Khusus Anak dan Perlindungan Perempuan.
- d. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jejaring yang melayani Keluarga Berencana.
- e. Memperkuat kerjasama dengan KUA se Kota Balikpapan dalam penyuluhan Calon Pengantin (CATIN).
- f. Memperkuat pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) anggota Kelompok Kegiatan (POKTAN) untuk ber KB.
- g. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan balita, anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
- h. Peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- i. Memperkuat komitmen aparaturnya kelurahan dalam penyediaan dan update data profil desa dan kelurahan (prodeskel) sebagai data dasar untuk peningkatan peran serta masyarakat.
- j. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja OPD diantaranya:

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk serta Banyaknya penduduk luar Balikpapan yang migrasi ke kota Balikpapan karena faktor ekonomi apalagi terkait dengan isu penyangga sebagai Ibukota Negara

- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi.
- Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;
- Masih rendahnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB, dan menjadi anggota UPPKA
- Pemahaman PUS tentang kesertaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait permasalahan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
- Masih tingginya Angka Stunting
- Belum optimalnya keluarga yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL serta UPPKA
- Belum semua sekolah membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- Belum optimalnya kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
- Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan, idealnya di satu kecamatan memiliki satu PPKS di setiap Balai Penyuluhan
- Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangsa Kencana
- Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi
- Kurangnya pemodalan untuk pengembangan Kelompok UPPKA
- Masih tingginya angka Median Usia Kawin Pertama (MuKP) dan belum optimalnya pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di kalangan remaja dan orang tua
- Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
- Kurangnya partisipasi dari Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) untuk menyukseskan Program Bangsa Kencana

- Pembentukan dan Pembinaan terhadap Poktan dan IMP dalam mendukung ketahanan keluarga belum optimal dilaksanakan.
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
- Cakupan data dan kualitas data yang belum optimal.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Kota Layak Anak
- Belum tersedianya data terpilah untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsive gender ;
- Belum meratanya tenaga/SDM Analisis Gender di seluruh OPD lingkup Pemerintah;
- Belum semuanya OPD menyusun anggaran yang berbasis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
- Belum optimalnya upaya pembinaan potensi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- Meningkatnya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada Anak
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- Masih minimnya kesadaran orang tua dan keluarga terkait upaya perlindungan anak ;
- Belum meratanya ketersediaan layanan konseling anak dan remaja di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan ;
- Belum optimalnya pemanfaatan waktu luang anak pada pengembangan minat dan bakat anak

- Belum ada Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan kurangnya sarana prasarana yang ramah anak
- Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik
- Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak
- Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat
- Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya
- Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya
- Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha
- Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program terkait perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.
- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum maksimalnya peran pokjanal posyandu di Kota Balikpapan;
- Belum maksimalnya kelurahan secara rutin mengupdate data dalam Evdeskel;
- Belum optimalnya Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- Minimnya Kelurahan yang memiliki profil kelurahan sesuai yang diarahkan Kemdagri (PRODESKEL)
- Teknologi Tepat Guna produk POSYANTEK belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, RT) yang belum optimal peran dukungannya;

- SDM yang ada pada OPD tidak bisa optimal melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kota dalam upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dengan alasan keterbatasan jumlah personil OPD yang tidak sesuai dengan kompleksnya 3 urusan wajib yang ditangani oleh Perangkat Daerah.
- Jumlah SDM yang terbatas dimana masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan SDM dan kondisi bezeting.

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan DP3AKB terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian / Penetapan Kinerja, yaitu melalui pelaksanaan program/kegiatan yang sudah tercantum dalam DPA. Realisasi anggaran DP3AKB Kota Balikpapan tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja adalah sebesar **Rp. 31,035,098,859.20** atau sebesar **88,94 %** dari Pagu Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar **Rp 34,895,597,896 ,00**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	5
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	11
1.6 Sistematika Penulisan	17
II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	36
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	42
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	52 59
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	59
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63 68
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	71 77
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	84 88
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	91 95
3.2.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	98 102



3.2.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	125
3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2024	139
IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	153
B.	Saran	154
LAMPIRAN		155

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	8
Tabel 1.2. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Berdasarkan Renstra 2021-2026	12
Tabel 1.3. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Berdasarkan Renstra 2025-2029	13
Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021-2026	21
Tabel 2.2 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2025-2029	24
Tabel 2.4 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029	25
Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	27
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Resntra Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Resntra Tahun 2025-2029	40
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 / Perubahan	43
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029	43
Tabel 2.10 Rencana Anggaran Belanja DP3AKB Tahun 2025	44
Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja tahun 2024 atas penilaian tahun 2025	52
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2025	53
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja	59
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025	60
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029	62
Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Renstra Tahun 2021-2026	64
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	67

	keluarga Berencana Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra 2021-2026	69
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2025-2029	71
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional dan dibandingkan dengan realisasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2021-2026)	72
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional dan dibandingkan dengan realisasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2025-2029)	74
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 atas Renstra 2021-2026	78
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	81
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	86
Tabel 3.15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	126
Tabel 3.16	Komposisi / Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB menurut tingkat pendidikan	127
Tabel 3.17	Jumlah asset yang dimiliki dan yang tidak terpakai	129
Tabel 3.18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Renstra tahun 2021-2026	131
Tabel 3.19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Renstra tahun 2025-2029	135
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2025 Renstra 2021-2026	139
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2025 Renstra 2021-2026	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	8
Gambar 1.2 Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	10
Gambar 1.3 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2025	10
Gambar 1.4 Grafik Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	10
Gambar 1.5 Capaian Kinerja DP3AKB tahun 2025	61
Gambar 1.6 Grafik Capaian IDG Kabupaten/Kota se Provinsi Kaltim	78
Gambar 1.7 Grafik Perbandingan IPG Kabupaten/Kota di Kaltim	76
Gambar 1.8 Grafik Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA)	77
Gambar 1.9 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	78
Gambar 1.10 Grafik Realisasi Nilai AKIP	80
Gambar 1.11 Puspaga Kecamatan Balikpapan Timur	113
Gambar 1.12 Pelayanan Konseling PUSPAGA di Sekolah-sekolah	114
Gambar 1.13 Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama	116
Gambar 1.14 Tangkapan Layar pada Aplikasi SIDAK KtPA	118
Gambar 1.15 Tangkapan layar Aplikasi SIMAPAN dan LAPOR PAK!	119
Gambar 1.16 Peraturan Walikota dan Cover dokumen GDPK	120
Gambar 1.17 Tangkapan layar Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)	125
Gambar 1.18 Diagram Komposisi /Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AKB menurut tingkat pendidikan	131

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1. | SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 |
| Lampiran 2. | SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 |
| Lampiran 3. | Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 |
| Lampiran 4. | Rencana Aksi (RENAKSI) tahun 2025 |
| Lampiran 5. | Matriks Renja Perubahan tahun 2025 |
| Lampiran 6. | Form E-81 TW 4 Tahun 2025 (evaluasi Renja) |
| Lampiran 7. | Piagam-piagam Penghargaan |
| Lampiran 8. | LHE dan Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat tahun 2025 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Para pemangku kepentingan yang terlibat dapat digolongkan menjadi 3 domain yaitu state atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, private atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha baik perorangan maupun lembaga, society atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta

isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat stratejik yang akan mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan. Mengingat pentingnya RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerah, oleh sebab itu perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai OPD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat selain melaksanakan tugas sesuai

dengan tufoksinya, agar dapat memberikan pelayanan yang baik, pelayanan prima, akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan salah satu faktor penentu untuk mewujudkan keinginan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Walikota Balikpapan No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

- ✓ Untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Kinerja DP3AKB berdasarkan target yang telah dituangkan sebelumnya.

- ✓ Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Balikpapan N0. 1 Tahun 2023 yang merupakan pengganti atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor N0. 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tujuan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas:

- ✓ menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan

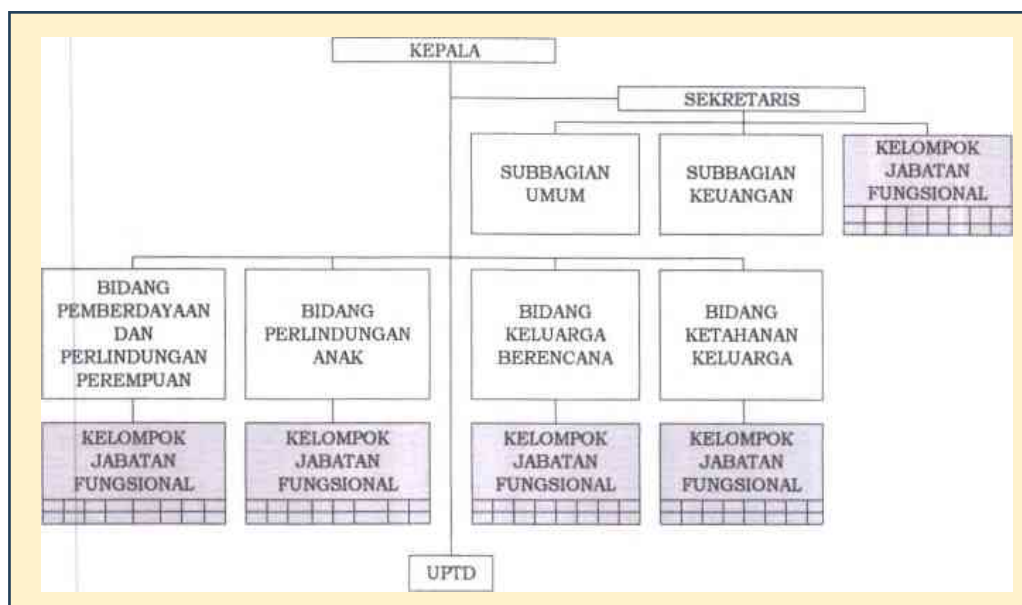
b. Fungsi:

- ✓ perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ penyusunan dokumen perencanaan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - ✓ pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - ✓ pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - ✓ pengoordinasian pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - ✓ pengoordinasian pelaksanaan program perlindungan perempuan;
 - ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga;
 - ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan hak anak;
 - ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan khusus anak;
 - ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa;

- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pengendalian penduduk;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keluarga berencana;
- ✓ pengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi

Sumber : Peraturan Walikota Balikpapan No. 1 tahun 2022

d. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DP3AKB Kota Balikpapan memiliki tenaga PNS maupun Non PNS termasuk Penyuluh KB yang merupakan PNS Pemerintah Pusat namun ditempatkan di Kota Balikpapan untuk mendukung kinerja pusat dan daerah dalam pengelolaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Meskipun PKB adalah PNS Pemerintah Pusat/ BKKBN tetapi dalam penyusunan LkjiP ini ketenagaan PKB kami perhitungkan sebagai SDM yang mendukung kinerja DP3AKB mengingat dalam lampiran “ N “ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam menjalankan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pendayagunaan Penyuluh KB sedangkan Pemerintah Pusat kewenangannya adalah pengelolaan PKB.

Jumlah pegawai Tahun 2025 dalam mendukung kinerja 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural di Kantor DP3AKB, 2 (dua) pejabat struktural di UPTD PPA, 7 (tujuh) pejabat fungsional, 17 staf pelaksana PNS, 9 (sembilan) staf pelaksana non PNS di Kantor DP3AKB, 9 (sembilan) staf non PNS di UPTD PPA, 5 (lima) staf non PNS di sekretariat TP PKK Kota, 3 (tiga) staf non PNS di Balai Penyuluhan dan 18 penyuluh KB (Organik Pemerintah Pusat).

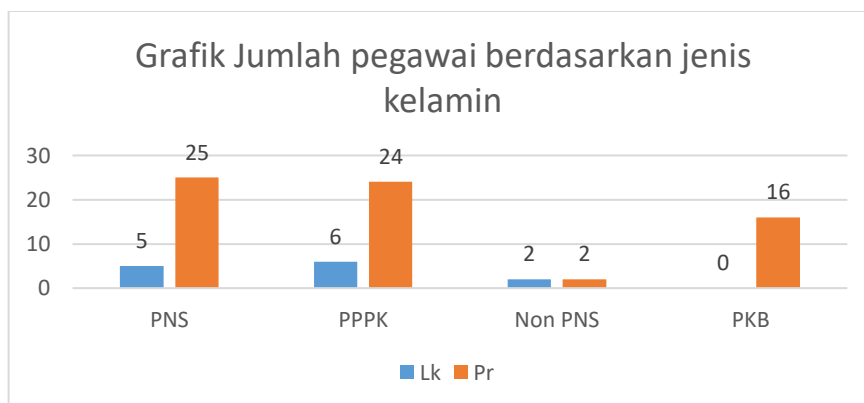
Tabel 1.1. Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				PPPK	Non PNS	Pendidikan					
			PNS						Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	L	P	IV	III	II	I								
Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretaris Dinas	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	4	3	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Kepala UPTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasubag Umum	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				PPPK	Non PNS	Pendidikan					
			PNS						Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	L	P	IV	III	II	I								
Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala TU UPTD	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Tertentu	-	11	-	7	-	-	4	-	2	9	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	10	32	-	11	5	-	26	-	-	26	3	12	-	1
Staf Non PNS	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	1
Penyuluh KB (Pegawai Pusat)	-	16	3	13	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-
Total	12	68	7	34	5	-	30	4	4	45	14	14	1	2
Jumlah Pegawai			46				30	4	80					

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025

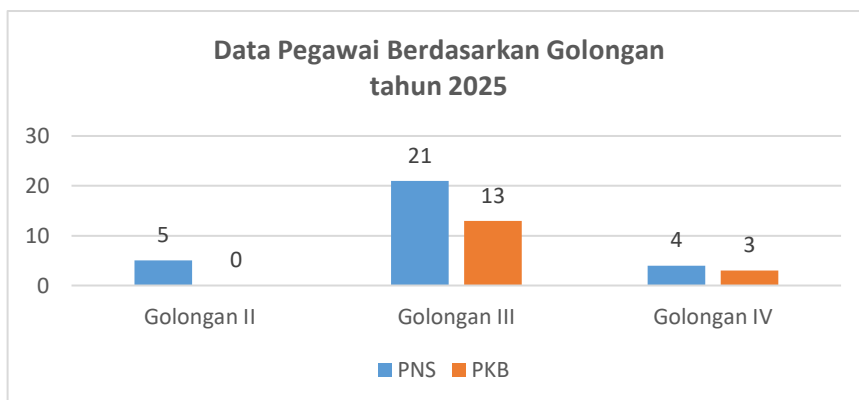
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan pada DP3AKB dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.2.
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Sumber: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2025

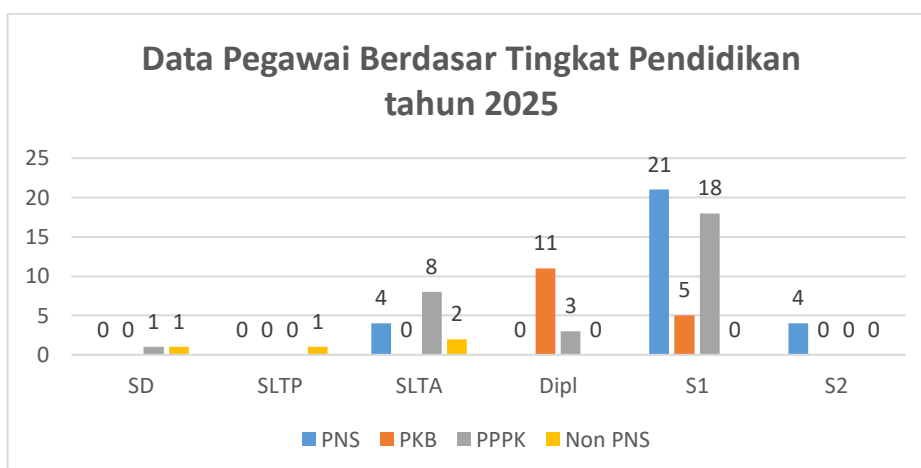
Dari grafik pada gambar 1.2 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah untuk PNS terdiri dari lima orang laki-laki dan 25 orang perempuan, pegawai PPPK terdiri dari enam orang laki-laki dan 24 orang

perempuan ,sedangkan pegawai non PNS terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, serta pegawai khusus PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) terdiri dari 16 orang perempuan, tidak terdapat PKB laki-laki.



Gambar 1.3.
Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2025
Sumber Data: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2025

Dari grafik pada gambar 1.3 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah untuk golongan II terdiri dari lima orang PNS, sedangkan golongan III terdiri dari 21 orang PNS dan 13 orang PKB, serta golongan IV terdiri dari empat orang PNS dan tiga orang PKB.



Gambar 1.4.
Grafik Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
Sumber Data : Kepegawaian DP3AKB Tahun 2025

Dari grafik pada gambar 1.4 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah untuk SD terdiri dari satu orang PPPK dan satu orang Non PNS, SLTP terdiri dari satu orang Non PNS, untuk SMU terdiri dari empat orang PNS, delapan orang PPPK dan satu orang Non PNS, sedangkan Diploma terdiri dari tiga orang PPPK dan 11 orang PKB, Sarjana (S1) terdiri dari 21 orang PNS, lima orang PKB dan 18 orang PPPK, serta strata pasca sarjana (S2) terdiri dari empat orang PNS.

1.5 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Kondisi kelembagaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Balikpapan Nomor No. 1 Tahun 2023 yang merupakan pengganti atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Hasil Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tiga (3) urusan yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- b. Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mewujudkan hasil kerja yang diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan yang mendukung 3 (tiga) urusan dimaksud adalah melalui perwujudan target Sasaran Strategis DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2025 yang dapat dijelaskan per urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Berdasarkan Renstra 2021-2026

Urusan DP3AKB	Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)	Program Prioritas
Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Perlindungan Khusus Anak
Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.	- Meningkatnya Kesertaan PUS ber KB	- Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Urusan DP3AKB	Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)	Program Prioritas
Non Urusan (Kesekretariatan)	- Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : RENSTRA DP3AKB Kota Balikpapan (2021-2026)

Tabel 1.3. Hubungan Keterkaitan antara Urusan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Berdasarkan renstra 2025-2029

Urusan DP3AKB	Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)	Program Prioritas
Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	- Program Pemenuhan Hak Anak - Program Perlindungan Khusus Anak
Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	- Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Non Urusan (Kesekretariatan)	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : RENSTRA DP3AKB Kota Balikpapan (2025-2029)

3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada akhir tahun 2024 sebagai data awal pencapaian kinerja pada awal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk serta Banyaknya penduduk luar Balikpapan yang migrasi ke kota Balikpapan karena faktor ekonomi apalagi terkait dengan isu penyangga sebagai Ibukota Negara;
- Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi.
- Masih belum optimalnya jumlah PUS yang menjadi peserta KB.
- Pemahaman PUS tentang kesertaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi masih kurang.
- Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
- Kurangnya partisipasi dari TOGA dan TOMA untuk menyukseskan Program Bangga Kencana
- Cakupan data dan kualitas data yang belum optimal
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait program bangga kencana termasuk program pendidikan kependudukan di sekolah dan perguruan tinggi serta kampung keluarga berkualitas.
- Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangga Kencana
- Masih tingginya Angka Stunting
- Belum optimalnya cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL
- Belum optimalnya cakupan remaja yang menjadi anggot PIK-R
- Belum optimalnya cakupan PUS Peserta KB yang menjadi anggota UPPKA
- Belum optimalnya cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
- Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan

- Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi.
- Kurangnya pemodalan untuk pengembangan Kelompok UPPKA

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum ada evaluasi hasil analisis gender (GAP,GBS)
- Belum optimalnya peran tim pokja, focal point, tim teknis kota Balikpapan.
- Belum tersedianya Rencana Kerja PUG Kota Balikpapan.
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda Kota Layak Anak
- Belum optimalnya data terpilah untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsive gender;
- Belum optimalnya upaya pembinaan potensi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- Meningkatnya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Masih minimnya kesadaran orang tua dan keluarga terkait upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak dan remaja;
- Belum meratanya ketersediaan layanan konseling anak dan remaja di seluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya pemanfaatan waktu luang anak pada pengembangan minat dan bakat anak

- Belum semua Kelurahan di Balikpapan sebagai Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan kurangnya sarana prasarana yang ramah anak
- Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum.
- Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik
- Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak
- Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat (guru SDH tidak ada BK)
- Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya
- Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya
- Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha
- Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program terkait perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum maksimalnya peran TPP posyandu di Kota Balikpapan;
- Belum optimalnya Peran & Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di daerah;
- Jumlah Posyandu yang terlalu banyak
- Belum tersedianya dana Insentif Kader Posyandu
- Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor terkait kegiatan PKK.

- Kurang Optimalnya pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Kota Balikpapan.

3.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 **Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**
- 3.2 **Capaian Kinerja Organisasi**
 - 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
 - 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3 **Realisasi Anggaran Tahun 2025**

IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi misi Kepala Daerah terpilih sebagai Visi misi Pemerintah Kota tahun 2021–2026 berikut penetapan dokumen RPJMD Kota Balikpapan yang akan dipergunakan sebagai panduan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi DP3AKB Kota Balikpapan. Adapun Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2021–2026 adalah:

a. Visi

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman “.

b. Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke-2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Sementara tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD

Kota Balikpapan pada tahun 2021-2026. Berpijak pada pemahaman yang akan dihadapi oleh perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah pada tahun 2021–2026, maka disepakati tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan pada tahun 2021– 2026 yang akan datang.

Adapun penjelasan singkat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DP3AKB Kota Balikpapan pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan ke-2 RPJMD, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing.

b. Sasaran

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatkan Kesertaan PUS ber KB
3. Meningkatkan Kelurahan kategori berkembang;
4. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran ke-5 RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas pembangunan gender.

**Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan
Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021-2026**

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
Misi ke-2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi	Tujuan ke-2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing	Sasaran ke-4 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sumber : Renstra DP3AKB 2021-2026

Pada tabel dibawah ini disajikan tabel , tujuan, sasaran strategis dan target Renstra 2021-2026:

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender		Persentase Anggaran yang responsif Gender	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%
	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA responsif Gender	2,34%	4%	8%	10%	15%	25%
	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,61%	70,61%	70,63%	70,65%	70,65%	70,65%
	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	n/a	5,88%	11,76%	29,41%	44,12%	58,82%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	n/a	75	76	77	78	79

Sumber : Renstra DP3AKB 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kepala daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Adapun Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Visi: **“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman.”**

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka telah ditetapkan 5 (lima) **misi**, yakni:

1. ***Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat***
2. ***Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur yang Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;***
3. ***Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;***
4. ***Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Manusia;***
5. ***Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.***

Dari uraian visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan periode tahun 2025-2029 dapat ditelaah dimana 1 (satu) dari 5 (lima) misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan periode Tahun 2025-2029 tersebut sangat relevan atau berkaitan secara eksplisit dengan 3 (tiga) urusan yang diamanahkan untuk ditangani oleh Dinas P3AKB Kota Balikpapan, terdapat pada misi ketiga RPJMD Kota Balikpapan tersebut yaitu ***Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik***

Tabel 2.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3AKB Kota Balikpapan
Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2025-2029:

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
Misi ke-3 Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik	Tujuan ke-3 SDM yang berdaya saing	Sasaran ke-9 Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra DP3AKB Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Tujuan Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masyarakat yang berdaya dan setara gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.34	90.36	90.36	90.37	90.38	90.39	90.5
	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,04	75.05	75.06	75.07	75.08	75.09	75.1
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63.74	63.75	63.75	63.76	63.77	63.78	63.79
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.43	66.6	67.8	68.9	70	70.9	71.9
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	81,25	81,25	83	83	85	85	86
	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	64.64	71.21	72	73	74	75	76



Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas P3AKB Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut dibawah ini.

Pada sub bab ini menyajikan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	Persentase Anggaran yang responsif Gender	45%	Masyarakat yang berdaya dan setara gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34			
Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase RKA responsif Gender	15%	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,05	I. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
							2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
								3) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
								4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi
						II. Program Perlindungan Perempuan	3. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
							4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
			Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,75		5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota
						III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
							IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	9) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
						V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	8. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
							9. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	11) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
						VI. Program Perlindungan Khusus Anak	10. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
							12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	14) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB (mCPR)	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	70,65%	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	68,9	VII. Program Pengendalian Penduduk	13. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15) Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal
							14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
								17) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
								18) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
								19) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
						VIII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	20) Pengendalian Program KKBPK
								21) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								22) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 23) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 24) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
						16. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)		25) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 26) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 27) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
						17. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		28) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								29) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
							18. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30) Pembinaan Terpadu Kampung KB
								31) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
						IX. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	19. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	32) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
								33) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
								34) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								35) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
								36) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
								37) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
							20. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								39) Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)
Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	100%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	83%	X. Program Administrasi Pemerintahan Desa	21. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
								41) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
						XI. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	22. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	42) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								43) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								44) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
							45) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								46) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	78	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73	XII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							24. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							25. Administrasi Umum Perangkat Daerah	49) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								50) Penyediaan Bahan Logistik kantor
								51) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								52) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							26. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							27. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								55) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						28. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		56) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								57) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								58) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Pada subbab ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Selain itu, subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode terbaru.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan DP3AKB Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 188.46-242/DP3AKB-SKT tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

TABEL 2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET. /KRITERIA
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya pengarus utamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Indikator digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi Politik, pengambilan keputusan dan partisipasi ekonomi	$1/3 (Ipar + IDM + linc-dist)$; Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	BPS	
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR) *100	%	Penggunaan Indikator kinerja seperti itu adalah bahwa untuk mengukur sampai sejauh mana kesertaan PUS ber-KB meningkat adalah dengan alat ukur perhitungan prosentase pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS (CPR)	Jumlah peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan)	Dallap (Laporan Pengendalian Lapangan) yang dimiliki oleh DP3AKB	Cukup Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET. /KRITERIA																																				
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN																																						
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	Tingkat perkembangan kelurahan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Katagori berkembang dibagi jumlah kelurahan dikali 100	Lampiran Permemdagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkemban gan desa																																				
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="3">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="3">Total</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th></tr><tr><th>20%</th><th>30%</th><th>50%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen			Total	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	20%	30%	50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup Jelas
Komponen	Sub-Komponen			Total																																							
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan																																								
	20%	30%	50%																																								
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																							
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																							
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																							
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																							
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																							

Sumber: SK IKU Nomer 188.46-242/DP3AKB-SKT Tahun 2024

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 188.3.3.7-04 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TABEL 2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Satuan Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat yang berdaya dan setara gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai kesenjangan antara pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan	Untuk menghitung IPG, perlu menghitung IPM (laki-laki dan perempuan), kemudian membandingkan nilai IPM perempuan dengan IPM laki-laki untuk melihat perbedaan atau kesenjangan. $IPG = (IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$	90.34	90.36	90.36	90.37	90.38	90.39	90.5	90.5
1		Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta dalam pengambilan keputusan	$IDG = \frac{\text{Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen} + \text{Indeks Perempuan Profesional} + \text{Indeks Kontribusi Pendapatan Perempuan}}{3}$	75.04	75.05	75.06	75.07	75.08	75.09	75.1	75.1
2		Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	ukuran yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	IPA dihitung berdasarkan pada lima klaster hak anak, yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA kemudian dihitung dengan menggabungkan nilai IPHA dan IPKA	63.74	63.75	63.75	63.76	63.77	63.78	63.79	63.79
3		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	ukuran kualitas keluarga yang diukur melalui tiga dimensi: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia, dengan 17 variabel yang tergabung dalam tiga dimensi tersebut.	Tata cara penghitungan iBangga ditetapkan oleh Kepala BKKBN. $iBangga = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$	65.43	66.6	67.8	68.9	70	70.9	71.9	71.9

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Satuan Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	Definisi operasional kualitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada pengukuran dan penilaian tingkat keberdayaan masyarakat melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur. Ini melibatkan identifikasi perubahan positif dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, sebagai hasil dari upaya pemberdayaan.	$\frac{\text{Jumlah lomba yang dimenangkan oleh lembaga kemasyarakatan}}{\text{Jumlah lomba yang diikuti}} \times 100\%$	81,25	81,25	83	83	85	85	86	86
5		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	hasil akhir dari evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana perangkat daerah tersebut telah menerapkan manajemen kinerja yang efektif	Penilaian inspektorat. (Integrasi dari dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja)	64.64	71.21	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	76.00

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada subbab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	73
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,65 %
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	%	84,45

Sumber: Perjanjian Kinerja DP3AKB Tahun 2025

Subbab ini juga memuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang masih mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dilakukannya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual.

Adapun perjanjian kinerja perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2025

sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,05
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,65 %
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP DP3AKB	%	84,45

Sumber : PK Perubahan DP3AKB tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	<i>Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	<i>Indeks</i>	<i>90,34</i>	<i>90,36</i>
1.1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,04	75,05
1.2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,74	63,75
1.3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,43	66,6

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81,25	81,25
1.5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,64	84,45

Sumber : PK Perubahan DP3AKB Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodir kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar **Rp 33.784.500.914**. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar **Rp 34.895.597.896** sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.10 Rencana Anggaran DP3AKB Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
I	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.05%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	391,437,662	APBDP
A				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	165,672,662	APBDP
1				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91,938,090	APBDP
2				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	73,734,572	APBDP
B				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225,765,000	APBDP
3				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100,765,000	APBDP
4				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	125,000,000	APBD Murni
II				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	675,988,885	APBDP
C				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	APBDP
5				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	APBDP
D				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	APBD Murni
6				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	APBD Murni
E				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,280,885	APBDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
7				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114,280,885	APBDP
III				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	421,246,140	APBDP
F				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421,246,140	APBDP
8				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	421,246,140	APBDP
IV				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	116,718,400	APBDP
G				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,718,400	APBDP
9				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	116,718,400	APBDP
V				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,819,189,727	APBDP
H				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	APBDP
10				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	APBDP
I				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,556,198,619	APBDP
11				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,556,198,619	APBDP
VI				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,029,434,321	APBDP
J				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1,025,522,610	APBDP
12				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1,025,522,610	APBDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
K				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	APBDP
13				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	APBDP
L				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256,083,043	APBDP
14				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	256,083,043	APBDP
VII	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,65	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	772,426,915	APBDP
M				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	286,784,300	APBDP
15				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	286,784,300	APBDP
N				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	485,642,615	APBDP
16				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000	APBD Murni
17				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	363,242,615	APBD Murni
18				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	56,400,000	APBD Murni
19				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6,000,000	APBD Murni
VIII				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,135,395,534	APBDP
O				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	307,658,206	APBD Murni
20				Pengendalian Program KKBPK	50,000,000	APBD Murni

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
21				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	25,000,000	APBD Murni
22				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52,800,000	APBD Murni
23				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149,000,206	APBD Murni
24				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30,858,000	APBD Murni
P				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	617,993,172	APBDP
25				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	272,000,000	APBD Murni
26				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	121,471,127	APBDP
27				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	224,522,045	APBDP
Q				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	890,634,831	APBDP
29				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	660,566,000	APBD Murni
30				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	230,068,831	APBDP
R				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	319,109,325	APBD Murni
31				Pembinaan Terpadu Kampung KB	142,037,325	APBD Murni
32				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	177,072,000	APBD Murni
IX				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3,268,138,850	APBDP
S				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,434,938,850	APBDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
33				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	171,625,000	APBDP
34				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	473,053,160	APBDP
35				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	209,000,000	APBDP
36				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	256,954,000	APBDP
37				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	135,329,650	APBDP
38				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	188,977,040	APBDP
T				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,833,200,000	APBD Murni
39				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	606,000,000	APBD Murni
40				Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	1,227,200,000	APBD Murni
X	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	281,659,077	APBDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
U				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281,659,077	APBDP
41				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	104,172,005	APBDP
42				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177,487,072	APBDP
XI				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9,111,490,487	APBDP
V				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,111,490,487	APBDP
43				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,410,000,000	APBDP
44				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,855,912,452	APBDP
45				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	308,784,309	APBDP
46				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	67,048,850	APBDP
47				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4,469,744,876	APBDP
XII	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP DP3AKB	84,45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,872,471,898	APBD Murni
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,189,640	APBD Murni
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,189,640	APBD Murni
W				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,721,929,544	APBDP
48				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,721,929,544	APBDP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2025	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	ANGGARAN (Rp)	KET
X				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,186,720,293	APBDP
49				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489,761,204	APBDP
50				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427,394,570	APBDP
51				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,455,365	APBDP
52				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186,109,154	APBDP
Y				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	815,936,000	APBDP
53				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	815,936,000	APBDP
Z				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443,513,921	APBDP
54				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103,893,921	APBDP
55				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339,620,000	APBDP
AA				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694,182,500	APBDP
56				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423,477,500	APBDP
57				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,643,000	APBD Murni
58				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146,062,000	APBDP
JUMLAH					34,895,597,896	APBDP

Sumber: DPPA DP3AKB kota Balikpapan tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

a. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana system ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Inspektorat Kota Balikpapan Nomor: 700/109/Irbn-III/ITKOT tahun 2025, tanggal 19 Mei 2025, bahwa hasil evaluasi/penilaian akintabilitas kinerja DP3AKB tahun 2024 atas penilaian tahun 2025 memperoleh nilai 71,21 atau predikat BB (Sangat Baik) dengan rincian penilaian dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1. Rincian hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja DP3AKB tahun 2024 atas penilaian tahun 2025:

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,98
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,76
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,44
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,03
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	71,21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: LHE SAKIP Inspektorat No.700/109/Irbn-III/ITKOT tahun 2025

Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Nilai total 71,21

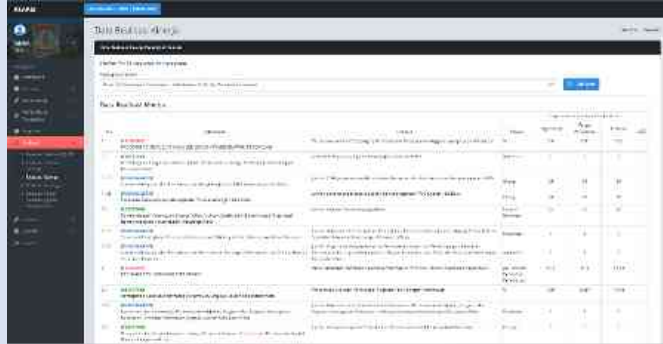
dengan predikat BB (Baik Sekali). AKIP sudah cukup baik ,namun demikian masih perlu banyak perbaikan khususnya akuntabilitas pada unit kerja.Terdapat peningkatan total nilai pada tahun 2024 dari **64,64** dengan predikat **B (Baik)** menjadi **71,21** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

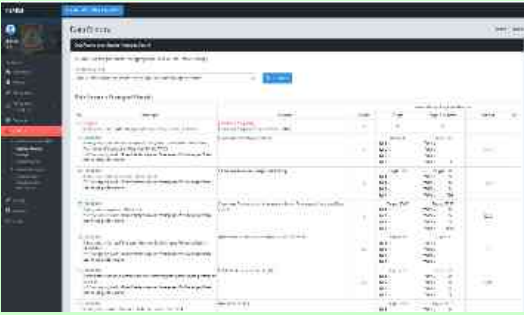
b. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi).

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, berupaya selalu memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi yang diberikan oleh tim Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan melalui Laporan hasil evaluasi LKjIP 2024 atas penilaian tahun 2025 Nomor 700/109/Irban-III/ITKOT, tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2025

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah diperbaiki agar diformalkan dalam dokumen Renstra.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja telah diperbaiki melalui perubahan IKU dan PK, namun belum dapat diformalkan dengan SK Walikota maupun Perda karena terkendala dengan panjangnya proses formalisasi dan tergantung dengan stakeholder dlm perencanaan (Bappeda) dan perubahan akan terkait dengan dokumen2 diatasnya (RPJMD dan RPJPD), selanjutnya akan disempurnakan dalam Renstra baru saja.   

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
2	Melakukan pemantauan atas pencapaian target perencanaan kinerja secara berkala guna mendorong terwujudnya hasil yang berkesinambungan.	pemantauan atas pencapaian target perencanaan kinerja telah dilakukan perbulan melalui money Fisik dan Keuangan (rakordal internal) kepada seluruh bidang, dan money IKU dan IKI dilakukan pertriwulan 
3	Melakukan penyempurnaan inputan data pada aplikasi Reaksi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sampai ketinggian individu pegawai.	inputan data realisasi pada aplikasi REAKSI telah rutin dilakukan per triwulan. 
4	Menyempurnakan laporan monitoring/evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan) agar dilengkapi dengan saran/rekomendasi terkait pencapaian target, dan tindak lanjut yang rinci pada setiap kegiatan yang dilakukan bukan bersifat umum;	pada saat money kinerja telah dilakukan saran/tindak lanjut 
5	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja Perangkat Daerah.	Sosialisasi dilakukan tiap bulan pada saat money dan rakordal internal 

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
6	Dokumen Laporan kinerja agar disusun secara berkala (triwulan).	telah dilakukan penyusunannya berupa Dokumen Monev IKU dan Dokumen Monev IKI yang dievaluasi tiap triwulan 
7	Mendorong evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera ditindaklanjuti serta mendorong perbaikan atas kualitas Implementasi Sakip Perangkat Daerah.	Rapat Koordinasi dan Pengendalain (rakordal) internal telah rutin dilakukan perbulan dan pertriwulan. 

Sumber: Data diolah DP3AKB tahun 2025

Adapun tindak lanjut hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi) yang telah dilakukan meliputi :

- Melakukan rapat pembahasan untuk memperbaiki Tujuan dan Sasaran Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyusun perubahan Perjanjian Kinerja berhubung terdapat perubahan strategi yang memengaruhi tujuan dan sasaran, Sejalan dengan hal tersebut maka sasaran strategis pada DP3AKB juga mengalami perubahan dan secara simultan perjanjian kinerja dan IKU DP3AKB juga mengalami perubahan.

Dasar Pertimbangan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan :

- a. Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, perubahan ini dilaksanakan dari 2023 sampai dengan tahun 2025.
- b. Arahan dan masukan dari Kegiatan penguatan AKIP oleh Kementerian PAN & RB RI kepada Pemerintah Daerah/OPD Kota Balikpapan tanggal 26 Juli 2023 – 28 Juli 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda secara virtual.
- c. Hasil Pembahasan Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan oleh Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Adapun item-item yang dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan berserta indikatornya yaitu:

SEMULA	MENJADI
TUJUAN: Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Gender
INDIKATOR: Persentase Anggaran yang responsif Gender	INDIKATOR Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- b. Memperbaiki 2 (dua) item Sasaran Strategis beserta Indikatornya yaitu:

No	SEMULA	MENJADI
1	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
	INDIKATOR: Persentase RKA Responsif Gender	INDIKATOR: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	SEMULA	MENJADI
2	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKB INDIKATOR: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah INDIKATOR: Nilai SAKIP DP3AKB

- c. Melakukan perbaikan formulasi indikator dengan menganalisa masalah yang dihadapi dan memberikan solusi perbaikan melalui rapat koordinasi Kepala Dinas dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Ketua Tim.
- d. Menetapkan ulang target sasaran yang lebih menantang (challenging) dengan melihat hasil evaluasi capaian target kinerja tahun berjalan.
- e. Perjanjian Kinerja perlu dilakukan perubahan berhubung terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi tujuan dan sasaran. Juga terdapat perubahan target dan prioritas serta asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- f. Berkoordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan terkait rekomendasi perubahan IKU sejalan dengan perubahan tujuan dan sasaran strategis DP3AKB.
- g. Menetapkan perubahan IKU dengan perubahan sasaran strategis melalui penetapan **SK Kepala DP3AKB Nomor 188.46-483/DP3AKB-Skt** tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- h. Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

- i. Pengumpulan data kinerja DP3AKB dilaksanakan seluruh bidang setiap bulan melalui link.bit.ly dan sudah tertuang dalam SOP tentang Mekanisme pengumpulan data Kinerja. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja yang sudah diinput pada link [http://bit.ly/Evaluasi RENJA DP3AKB 2025](http://bit.ly/Evaluasi_RENJA_DP3AKB_2025) dikumpulkan dan dirangkum oleh bagian program untuk diinput kembali pada aplikasi Reaksi milik Pemerintah Kota Balikpapan yang beralamat pada <https://reaksi.balikpapan.go.id>. Dengan adanya aplikasi milik Pemkot Balikpapan maka DP3AKB tidak lagi membuat sistem aplikasi pengumpulan data kinerja dan evaluasi kinerja.
- j. Membuat pohon kinerja dan memanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi dan atas *crosscutting* yang ada melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja.
- k. Tahun 2025 juga disusun Perjanjian Kinerja yang baru menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di dalam Renstra tahun 2025-2029.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan terkait penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan, 2025

Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Subbab ini menyajikan capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan realisasi yang dicapai sepanjang tahun tersebut. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

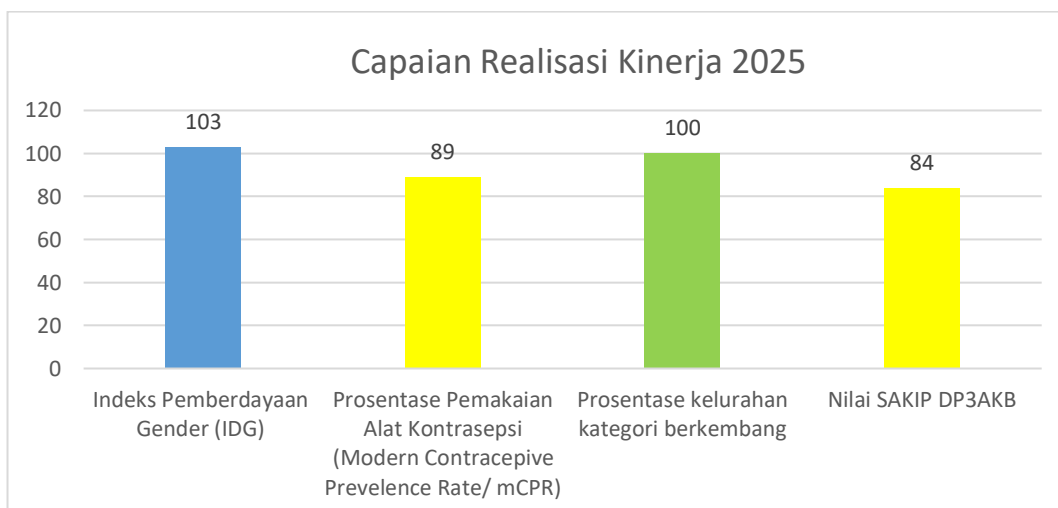
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	73	75.04*	103%	Melebihi Target	Penyesuaian indikator dan target pada IKU
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	persen	70.65	63.12	89%	Tidak Tercapai	Secara target Kota Balikpapan masih belum bisa mencapai, namun realisasi yang ada sudah merupakan 1 dari 10 Kab/Kota yang realisasinya diatas realisasi Propinsi Kalimantan Timur bahkan diatas realisasi nasional
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase kelurahan kategori berkembang	persen	100	100	100%	Tercapai/ Sesuai Target	Semakin intensnya sosialisasi dan pembinaan tentang administrasi dan pelaporan kepada kelurahan-kelurahan
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84.45	71.21	84%	Tidak Tercapai	Perlu perbaikan dalam menentukan indikator tujuan dan sasaran strategis yang SMART, dan perlu evaluasi penetapan target

Catatan:

*data realisasi tahun 2024 sumber data dari BPS, untuk tahun 2025 belum rilis

Sumber: Data DP3AKB yang diolah



Sumber: Form E.81 Evaluasi Renja REAKSI

Gambar 1.5.
Capaian Kinerja DP3AKB Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.4 dan Gambar 1.5 diatas bahwa capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar **94 %** pada tahun 2025 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tidak mencapai target**. Pada sasaran strategis 1 capaian kinerja **melebihi target (warna biru)** dan sasaran strategis 3 capaian kinerja adalah **tercapai/sesuai target (warna hijau)**, sasaran strategis 2 dan ke 4 capaian kinerja **tidak tercapai (warna kuning)**. Realisasi kinerja pada sasaran satu (1) di tahun 2025 belum dapat diketahui nilainya, karena sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum di rilis sehingga capaian kinerja diperoleh dari data tahun 2024.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2021-2026.

Subbab ini juga menyajikan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	<i>Indeks</i>	90.36	91.04	100.8%	Melebihi Target	Tahun 2025 masih belum rilis sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024. Secara wilayah, IPG Kota Balikpapan pada tahun 2024 berada pada level 91,04; lebih tinggi dari IPG Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada level 87,46. IPG Kota Balikpapan tertinggi diantara kabupaten kota di provinsi Kalimantan Timur.
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75.05	75.04	99.99%	Tercapai	sebagaimana IPG, IDG Tahun 2025 juga masih belum rilis sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024. Secara wilayah, IDG Kota Balikpapan pada tahun 2024 berada pada level 75,04; lebih tinggi dari IDG Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada level 61,41.
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63.75	72.33	113.5%	Melebihi Target	Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Balikpapan tahun 2025, datanya belum tersedia secara spesifik, jadi data yang digunakan adalah data tahun 2024
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66.6	77.2	115.9%	Melebihi Target	iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81.25	68.75	84,6%	Tidak Tercapai	dari 16 jenis lomba tingkat provinsi dan nasional yang diikuti, hanya 11 yang berhasil menang di tingkat provinsi
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.45	71.21	84,3%	Tidak Tercapai	Target yang digunakan adalah target pada Renstra lama (2021-2026) sehingga perlu evaluasi penetapan target pada Renstra baru (2025-2029) dan sudah dilakukan perbaikan pada Renstra periode berikutnya.

Berdasarkan tabel 3.5 diatas bahwa capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar **99.65 %** pada tahun 2025 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tidak mencapai target**. Pada sasaran strategis 1 capaian kinerja **tercapai/sesuai target** dan sasaran strategis 2 dan 3 capaian kinerja adalah **melebihi target**, sasaran strategis 4 dan 5 capaian kinerja **tidak tercapai**. Realisasi kinerja pada sasaran satu, dua dan tiga di tahun 2025 belum dapat diketahui nilainya, karena sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum di rilis sehingga capaian kinerja diperoleh dari data tahun 2024

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada sub bab ini memuat pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.62	N/A	69.27	N/A	72	104%	75.04	102%	75.04	103%
Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70.3	70%	52.81	75%	61.02	86%	64.45	91%	63.12	89%
Meningkatnya Keluruhan Kategori berkembang	Prosentase keluruhan kategori berkembang	%	N/A	N/A	38.24	650%	100	100%	100	100%	100	100%
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84.33	100%	83.64	99%	52.98	63%	64.64	77%	71.21	84%

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

Berdasarkan data tabel 3.5 dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun terakhir realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026,

Dari empat sasaran strategis yang ada, realisasi kinerja pada sasaran 1 di tahun 2025 belum dapat diketahui nilainya, karena sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum di rilis. Sedangkan realisasi tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat kenaikan/peningkatan sebesar 3.04 point.

Pada sasaran 2 realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan persentase capaian sejumlah 1.33%. Nilai mCPR memang mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Pada sasaran 3 tidak terjadi peningkatan yang signifikan artinya memang stag setiap tahun dan terealisasi 100% dan kondisi ini memang

sesuai yang diharapkan, bahwasanya setiap Kelurahan harus berusaha menjadi kelurahan berkembang dan maju.

Sedangkan realisasi kinerja sasaran 4 mengalami peningkatan sejumlah 6,57 point atau naik 7% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Adapun penjelasan dari masing-masing realisasi kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengarusamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Data IDG Tahun 2025 masih belum di rilis sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024. Secara wilayah, IDG Kota Balikpapan pada tahun 2024 berada pada level 75,04; lebih tinggi dari IDG Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada level 61,41.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB

Indikator : Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/mCPR).

Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (MCPR) tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2 % dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya akan tetapi mengalami kenaikan sebesar 19% bila dibanding awal perencanaan tahun 2021. Data yang disampaikan adalah data yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) melalui laporan faskes.

Secara target Kota Balikpapan masih belum bisa mencapai, namun realisasi yang ada sudah merupakan 1 dari 10 Kab/Kota yang realisasi nya diatas realisasi Propinsi Kalimantan Timur bahkan diatas realisasi nasional.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang.

- Indikator : Prosentase kelurahan kategori berkembang.
- Tidak adanya peningkatan atau stagnasi realisasi, kondisi ini dikarenakan realisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu sudah 100% kelurahan berkembang dan indikator kinerja ini merupakan tahun terakhir urusan yang diampu DP3AKB sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada per 1 Januari 2022 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan) dilimpahkan ke DP3AKB. Terdapat penetapan target yang sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran ke 3 mampu mencapai realisasi 100% kelurahan kategori berkembang pada tahun lalu.
- Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
- Indikator : Nilai SAKIP DP3AKB
- Realisasi nilai SAKIP DP3AKB tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7%, dimana total nilai 71,21 dengan predikat BB/Sangat Baik yang semula nilainya 64,64 pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, subbab ini juga memuat analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum 2025. Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sementara kolom untuk tahun-tahun sebelumnya (kecuali yang ada realisasi) diberi tanda (-)

sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	90.24	-	-	90.48	-	-	90.59	-	-	90.80	-	90.36	91.04	100.8%
Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	68.62	-	-	69.27	-	-	72.00	-	-	75.04	-	75.05	75.04	99.99%
Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	72.67	-	-	66.32	-	-	63.74	-	-	72.33	-	63.75	72.33	113.5%
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	-	-	-	-	58.74	-	-	60.15	-	-	65.43	-	66.6	77.2	115.9%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.25	68.75	84.6%
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	83.64	-	84.33	52.98	62.8%	84.4	64.64	76.6%	84.42	71.21	84.4%	84.45	71.21	84.3%

Data IPG sebagai Indikator Tujuan OPD Tahun 2025 masih belum rilis sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024. Secara wilayah, IPG Kota Balikpapan pada tahun 2024 berada pada level 91,04; lebih tinggi dari IPG Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada level 87,46. IPG Kota Balikpapan tertinggi diantara kabupaten kota di provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana IPG, IDG Tahun 2025 juga masih belum rilis sehingga data yang digunakan adalah data tahun 2024. Secara wilayah, IDG Kota Balikpapan pada tahun 2024 berada pada level 75,04; lebih tinggi dari IDG Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada level 61,41.

Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Balikpapan tahun 2025, datanya belum tersedia secara spesifik, jadi data yang digunakan adalah data tahun 2024 dengan capaian 72,33 atau 113%. Capaian tahun terakhir sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota terus berupaya melalui program seperti **Kota Layak Anak (KLA)** dan telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) terkait KLA di tahun 2025, dengan data pencapaian tahun sebelumnya menunjukkan predikat Utama, mengindikasikan komitmen kuat pada perlindungan anak.

Nilai iBangga cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan Kota Balikpapan untuk tahun 2025 sudah mencapai 77.2 atau 115,9% dari target. Artinya sudah cukup baik. Capaian ini juga sudah menjadikan kota Balikpapan di posisi kedua dibawah Kota Bontang untuk peraihan iBangga se provinsi Kaltim.

Capaian pada sasaran strategis ke empat adalah 85%. Dari 16 jenis lomba kelembagaan tingkat provinsi dan nasional yang diikuti, hanya 11 yang berhasil menang di tingkat provinsi sehingga realisasi hanya 68,75% sedangkan targetnya sebesar 81,25%.

Pada sasaran strategis kelima target yang digunakan adalah target pada Renstra lama (2021-2026) sehingga perlu evaluasi penetapan target pada Renstra baru (2025-2029) dan sudah dilakukan perbaikan pada Renstra periode berikutnya. Dari target 84.45 realisasi hanya 71,21 atau capaiannya sebesar 84%.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Subbab perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis menyajikan analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	-	75.04	-	-	-
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	%	70.65	63.12	89%	70.65	89%
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase kelurahan kategori berkembang	%	100	100	100%	100	100%
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	-	71.21	-	-	-

Sumber data : laporan evaluasi Renja DP3AKB 2025

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis DP3AKB terdapat empat indikator kinerja sasaran. Indikator sasaran yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah satu indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan Kategori berkembang dengan tingkat kemajuan 100 %, sedangkan indikator kinerja lainnya yaitu Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR*)” baru mencapai 89% tingkat kemajuannya pada target jangka menengah Renstra. Untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan indikator Nilai SAKIP DP3AKB tidak terdapat pada dokumen Renstra, karena sebelumnya indikator dalam Renstra adalah **Prosentase RKA Responsif Gender dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2021-2029**. Perubahan indikator tersebut hanya dilakukan pada SK IKU dan melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berhubung terdapat perubahan strategi yang memengaruhi tujuan dan sasaran sebagai tindak lanjut rekomendasi dari tim Evaluator SAKIP. Sejalan dengan hal tersebut maka sasaran strategis pada DP3AKB juga mengalami perubahan dan secara simultan IKU DP3KB juga mengalami perubahan.

Selain itu, subbab ini juga menyajikan perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka
Menengah Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6/8*100
	<i>Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	<i>Indeks</i>	90.36	91.04	100.8%	90.39	100.7%
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75.05	75.04	99.99%	75.09	99.93%
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63.75	72.33	113.5%	63.78	113.4%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66.6	77.2	115.9%	70.9	108.9%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81.25	68.75	84,6%	85	81%
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	84.45	71.21	84,3%	75	95%

Sumber data : laporan evaluasi IKU DP3AKB 2025

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis DP3AKB terdapat satu indikator tujuan dan lima indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2025 realisasi indikator tujuan telah memenuhi target jangka menengah dengan capaian sebesar 100,7%. Untuk indikator sasaran kesatu baru tercapai 99,93%, indikator sasaran kedua sudah melampaui target dengan capaian 113,4%, indikator tiga sudah 108,9%, indikator keempat baru 81% dan indikator sasaran kelima baru tercapai 95% dari target jangka menengah.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Brenchmark Kinerja)

Subbab perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (benchmark kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional dan dibandingkan dengan realisasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2021-2026)

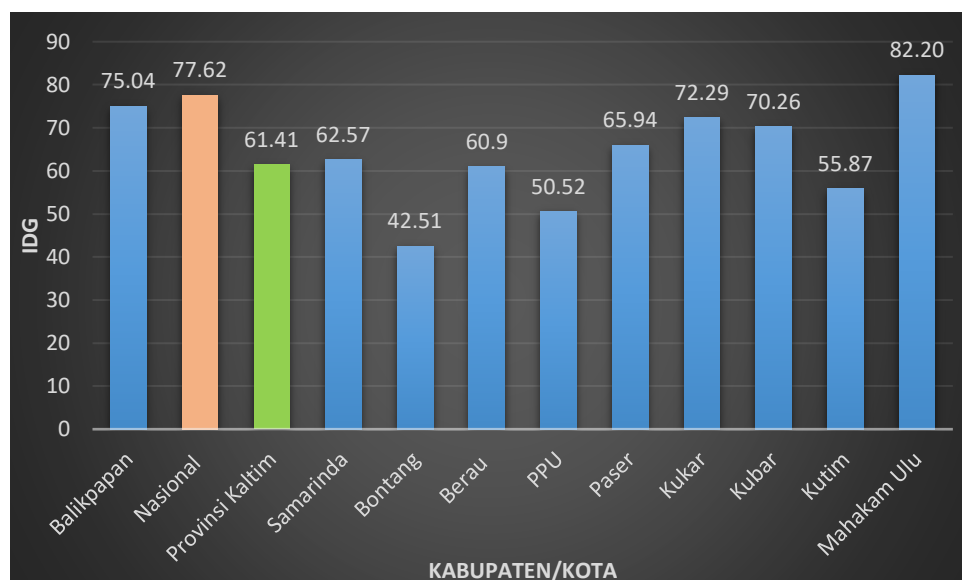
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Realiasi Provinsi Kaltim
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75.04	77.62	61.41
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	%	63.12	63.41	62,18
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase kelurahan kategori berkembang	%	100	-	-
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	71.21	-	-

Sumber data: BPS RI, LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja DP3AKB ada sebagian yang tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena DP3AKB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Untuk **Sasaran 1** capaian DP3AKB sebesar 75,04, dimana realisasi nasional untuk IDG sebesar 77,62 dan realisasi Provinsi Kaltim sebesar 61,41. Artinya IDG Kota Balikpapan masih dibawah realisasi nasional namun sudah melampaui realisasi Provinsi Kaltim. Balikpapan menempati posisi kedua setelah Kabupaten Mahakam Ulu.

Perbandingan realisasi **Sasaran 1** ini, jika dibandingkan dengan angka nasional, provinsi Kaltim dan Kabupaten/kota lain dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.6. Grafik capaian IDG Kabupaten/Kota se Provinsi Kaltim

Kinerja DP3AKB lain yang dapat disandingkan dengan standar nasional adalah indikator **sasaran 2**, capaian realisasi tahun 2024 adalah 63,12 % sedangkan realisasi nasional sejumlah 63,41% dan realisasi provinsi Kaltim sebesar 62,18 %. Realisasi ini meskipun tidak mencapai target Renstra namun sudah berhasil melampaui realisasi provinsi Kaltim dan masih sedikit dibawah realisasi nasional. Data mengenai angka

prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun nasional pada tahun 2025 belum tersedia, sehingga saat ini masih digunakan data tahun 2024.

Sementara untuk sasaran indikator kinerja lainnya berdasarkan pada indikator kinerja OPD yang disusun berdasarkan penilaian mandiri OPD DP3AKB. **Sasaran III** sudah mencapai 100 % kelurahan berkembang. Di tingkat provinsi maupun nasional tidak ada angka pembandingnya. Demikian juga untuk **Sasaran IV**, DP3AKB belum bisa membandingkan dengan realisasi provinsi maupun nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional dan dibandingkan dengan realisasi pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2025-2029)

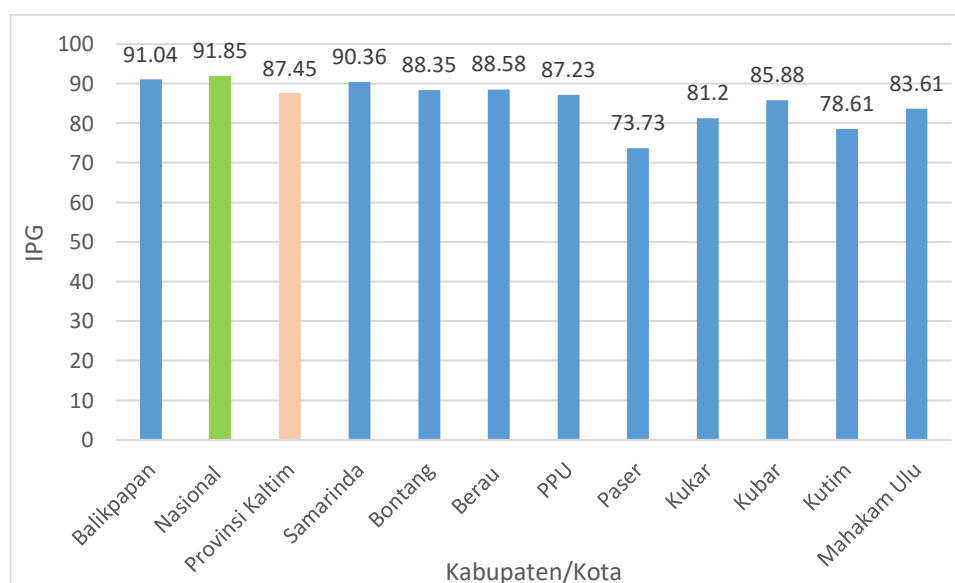
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Realiasi Provinsi Kaltim
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
	<i>Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	<i>Indeks</i>	91.04	91.85	87.45
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75.04	77.62	61.41
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72.33	71.02	71.98
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	77.2	72.3	73.6
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	68.75	-	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Realiasi Provinsi Kaltim
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.21	-	-

Sumber data: BPS RI, LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja DP3AKB ada sebagian yang tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena DP3AKB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya. Untuk indikator Tujuan OPD, capaian DP3AKB Kota Balikpapan sebesar 91,04, sedangkan realisasi nasional untuk tahun yang sama adalah 91.85 dan realisasi provinsi Kaltim sebesar 87,45. Artinya Kota Balikpapan sudah melampaui capaian provinsi Kalimantan Timur dan capaian tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim, walaupun masih sedikit berada di bawah realisasi nasional.

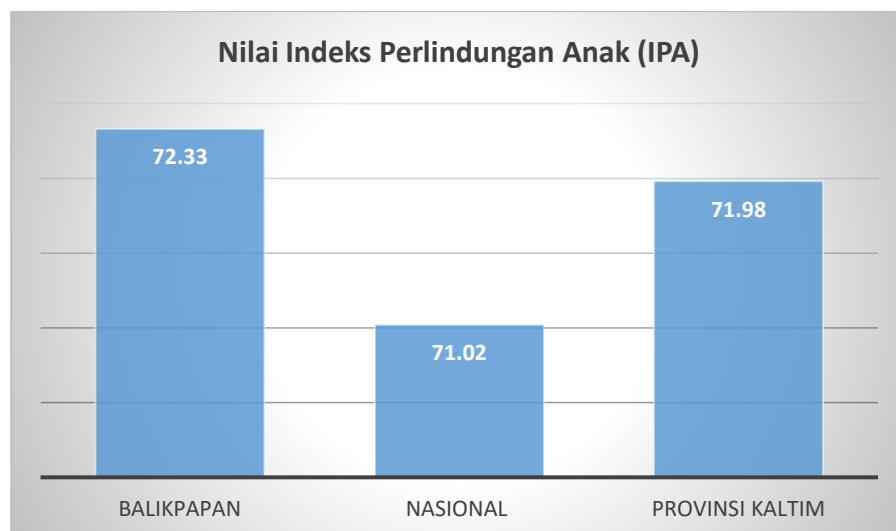
Sebagai pembanding (benchmarking) dengan Kabupaten/Kota lain sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini:



Gambar. 1.7. Grafik Perbandingan IPG Kabupaten/Kota di Kaltim

Untuk **Sasaran 1** capaian DP3AKB sebesar 75,04, dimana realisasi nasional untuk IDG sebesar 77,62 dan realisasi Provinsi Kaltim sebesar 61,41. Artinya IDG Kota Balikpapan masih dibawah realisasi nasional namun sudah melampaui realisasi Provinsi Kaltim. Benchmarking dengan kota/kabupaten lain sebagaimana tampak pada Gambar 1.6. Grafik capaian IDG Kabupaten/Kota se Provinsi Kaltim.

Kinerja DP3AKB lain yang dapat disandingkan dengan standar nasional adalah indikator **sasaran 2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)**, capaian realisasi tahun 2024 adalah 72,33 sedangkan realisasi nasional sejumlah 71,02 dan realisasi provinsi Kaltim sebesar 71,98. Realisasi ini sudah melebihi target Renstra dan sudah berhasil melampaui realisasi provinsi Kaltim bahkan realisasi nasional. Hal ini dibuktikan dengan Balikpapan meraih Kategori Kata Layak Anak kategori Utama.



Gambar 1.8. Grafik Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Untuk **sasaran 3**, capaian realisasi tahun 2024 adalah 77.2 sedangkan realisasi nasional sejumlah 72,3 dan realisasi provinsi Kaltim sebesar 73.6, artinya Capaian Kota Balikpapan sudah melampaui angka realisasi Provinsi Kaltim dan Angka realisasi Nasional. Di provinsi Kaltim, Balikpapan menduduki posisi kedua setelah Kota Bontang.

Berikut adalah hasil penghitungan iBangga untuk provinsi Kaltim

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA) HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25						
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	iBangga 2025	Dimensi		
				Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
356	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	69,4	77,8	70,7	59,7
357	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	77,2	88,9	81,8	80,8
358	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	77,3	88,2	80,2	83,5
359	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	73,4	83,0	76,2	61,1
360	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	68,9	77,5	71,7	57,4
361	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	73,5	79,3	78,1	63,3
362	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	69,0	74,2	70,9	61,8
363	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	68,8	78,8	64,3	63,4
364	KALIMANTAN TIMUR	PASER	71,8	80,5	73,1	61,8
365	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	72,6	85,5	75,0	57,2
366	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN	69,7	78,4	74,1	56,6
367	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	74,1	84,7	78,6	59,0
368	KALIMANTAN UTARA	MALINAU*	53,9	66,0	56,3	39,4
369	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	68,5	79,5	66,8	50,3
370	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	72,1	82,9	78,1	55,2

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25: *Kabupaten/Kota dengan RSE antara 25% s.d. 50% artinya estimasi indikator kurang akurat, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggunakan estimasi; **Kabupaten/Kota dengan RSE lebih dari 50% atau tidak ada atau kurangnya sampel artinya estimasi indikator tidak akurat sehingga estimasi tidak dapat digunakan

Keterangan kategori iBangga:

Status pembangunan keluarga tinggi (nilai iBangga ≥ 75)
Status pembangunan keluarga menengah atas ($60 \leq$ nilai iBangga < 75)
Status pembangunan keluarga menengah bawah ($45 \leq$ nilai iBangga < 60)
Status pembangunan keluarga rendah (nilai iBangga < 45)

Gambar. 1.9. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Sementara untuk sasaran indikator kinerja lainnya berdasarkan pada indikator kinerja OPD yang disusun berdasarkan penilaian mandiri OPD DP3AKB. **Sasaran 4** Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional baru mencapai angka 68,75% belum mencapai target 2025 diangka 81,25.

Adapaun rincian perliombaan tingkat Provinsi dan Nasional yang diikuti oleh lembaga kemasyarakatan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

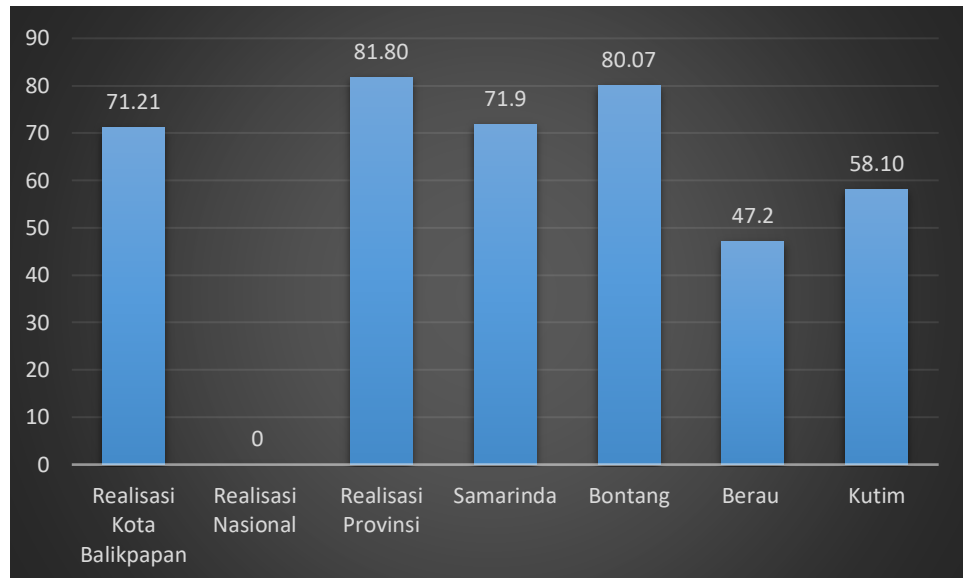
1. Kelurahan Gunung Sari Ilir menjadi perwakilan Kota Balikpapan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, menampilkan inovasi Kampung Bungas sesuai dengan tema Lomba Kelurahan Tahun 2025 adalah Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas. Dalam pelaksanaan lombanya Kelurahan Gunung Sari Ilir meraih juara 2.
2. Posyandu Mutiara Hati 33 Kelurahan Sungai Nangka menjadi Juara 1 dalam lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan sudah diterapkannya 6 bidang SPM di dalam Posyandu

- Mutiara hati 33, serta dukungan dan keaktifan kader dalam membuat inovasi dan meningkatkan jumlah kunjungan di posyandu
3. Ketua RT 49 Kelurahan Gunung Sari Ilir mewakili Kota Balikpapan mengikuti lomba RT Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses administrasinya, RT 49 Kelurahan Gunung Sari Ilir gugur dan tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.
 4. Dari 4 kategori Lomba Teknologi Tepat Guna yang diikuti yaitu Unggulan, Inovasi, Posyantek, dan Makanan Olahan Lokal, hanya Posyantek Jaya Abadi dari Kecamatan Balikpapan Selatan yang berhasil meraih juara 2 di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
 5. LPM kelurahan Sepinggian mewakili Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, namun gugur di dalam proses administrasi dokumen dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya
 6. TP PKK Kota Balikpapan mencatat prestasi gemilang dengan meraih juara pertama pada tujuh kategori lomba Keberhasilan Pembangunan Bidang PKK tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025. Prestasi tersebut diumumkan melalui Keputusan Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Nomor 08/KEP/PKK.PROV/X/2025, yang menetapkan pemenang berbagai lomba, mulai dari Dasa Wisma, PAAR Peran Keluarga dalam Pencegahan Bully, UP2K PKK, Aku Hatinya PKK, hingga PHBS dan LBS.

Jenis Lomba	Jumlah	Juara Yang Didapat
Kelurahan	1	1
Posyandu	1	1
RT	1	0
TTG	4	1
BBGRM	1	0
PKK	8	8
Total	16	11
Persentase	68,75%	

Untuk sasaran ini, di tingkat provinsi maupun nasional tidak ada angka pembandingnya.

Untuk **Sasaran 5**, DP3AKB belum bisa membandingkan dengan realisasi nasional, tetapi dapat dibandingkan dengan realisasi provinsi maupun beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sebagaimana grafik berikut:



Gambar. 1.10. Grafik Realisasi Nilai AKIP

Nilai AKIP DP3AKB Kota Balikpapan jika dilihat pada grafik masih berada di bawah Kota Bontang dan sedikit dibawah Kota Samarinda, dibanding dengan realisasi provinsi Kalimantan Timur juga masih jauh dibawahnya.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada subbab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun

kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 atas Renstra 2021-2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
	Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	Persentase Anggaran yang responsif Gender	%	109%	Melebihi Target (>100%)	➤ Komitmen dari seluruh OPD untuk menyusun PPRG ➤ Adanya dasar hukum yang kuat, seperti undang-undang kesetaraan gender atau pedoman penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender. Regulasi ini memberikan mandat yang jelas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengalokasikan dan melaporkan belanja yang responsif gender.	➤ Sebaiknya ada evaluasi hasil analisis gender (GAP,GBS) ➤ Optimalisasi peran tim pokja, focal point, tim teknis kota Balikpapan. ➤ Menyusun Rencana Kerja PUG Kota Balikpapan. ➤ Menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ➤ Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam mengkatagorikan anggaran responsive gender dengan melakukan sosialisasi terhadap perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan anggaran responsif gender
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	persen	103%	Melebihi Target (>100%)	➤ Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana kota Balikpapan	➤ Meningkatkan kualitas pelatihan penyusunan ARG

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
	perempuan dan anak					sudah memiliki Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan ➤ Pelaksanaan penguatan SDM perencana bagi OPD melalui kegiatan pelaksanaan PPRG ➤ Koordinasi dan konsolidasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi masing-masing ➤ Sosialisasi guna peningkatan peran aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Kota Balikpapan ➤ Penanganan intensif pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kepada seluruh OPD ➤ Optimalisasi Keterlibatan peran OPD dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak; ➤ Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik (ekonomi dan politik), serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggungjawab dan pemanfaatan waktu antara laki-laki dan perempuan

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	persen	89%	Tidak Tercapai	➤ Belum mencapai target karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya ber-KB, menganut paham tertentu, memiliki penyakit tertentu serta khawatir untuk menggunakan alat kontrasepsi. ➤ Cakupan data dari beberapa fasilitas kesehatan yang kurang akurat (tidak dilaporkan). Ada beberapa fasilitas Kesehatan yang melakukan pemasangan KB mandiri tapi tidak melaporkan ke dinas terkait. ➤ Belum maksimalnya KIE tentang 8 Fungsi Keluarga.	1. Peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB) 2. Peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern 3. KIE peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi bagi pasangan usia muda.
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	persen	100%	Tercapai / Sesuai Target	- hasil dari upaya berkelanjutan dalam pembinaan dan pendampingan kelurahan, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kelurahan. - Adanya dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel	Koordinasi dan Konsolidasi ke Kecamatan untuk melakukan monitoring Kelurahan agar rutin mengupdate data Prodeskel dan Epdeskel

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	84%	Tidak Tercapai	Tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra tidak menggambarkan tupoksi dan <i>core bussines</i> serta tidak berorientasi outcome. Terhadap penetapan target sasaran juga kurang <i>challenging</i> . Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra dinilai oleh evaluator masih kurang tepat	Memperbaiki tujuan dan sasaran dan memformulasikan indikatornya. Terdapat target dan sasaran yang dirubah lebih menantang sekaligus menyelaraskan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya dan menyusun perubahan Indikator Kinerja Utama

Sumber: Evaluasi Renja dan IKU DP3AKB Kota Balikpapan, 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
	Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	100.8%	Melebihi Target (>100%)	1. Secara umum peningkatan pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) dalam periode 2020-2024 baik secara umum maupun menurut jenis kelamin menunjukkan tren membaik, atau dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan semakin berkualitas. 2. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah kota	Rekomendasi yang bisa diberikan, untuk pencapaian angka Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan yang lebih baik tentunya kita lihat dari masing-masing angka penyusunnya 1. Usia harapan hidup saat lahir (UHH) 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) 3. Rata-rata lama sekolah (RLS) Perbaikan ketiga angka tersebut tentunya juga akan membawa dampak positif bagi angka IPG Kota Balikpapan ke depan.

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
						berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan 3. mayoritas keluarga di Balikpapan tidak lagi membatasi pendidikan hanya bagi laki-laki, namun perempuan turut didorong untuk mengenyam tingkat pendidikan tinggi.	
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	99.99%	Sesuai Target	1. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Balikpapan pada periode 2020-2024 terus mengalami kenaikan 2. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manajer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan	untuk angka Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Kota Balikpapan yang lebih baik bisa dengan meningkatkan peran perempuan di Kota Balikpapan di 3 aspek berikut: 1. Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen 2. Proporsi penempatan perempuan di kalangan manajerial atau pembuat keputusan 3. Pemerataan distribusi perempuan antara kepala rumah tangga laki-laki dan kepala rumah tangga perempuan
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	113.5%	Melebihi Target (>100%)	• Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah diterbitkan, menunjukkan komitmen baru. • Balikpapan telah meraih predikat Utama dan terus berupaya mencapai KLA, dengan kolaborasi antar dinas melalui rapat gugus tugas.	Upaya yang dilakukan mencakup 1. Penguatan sistem perlindungan anak (SPA) yang terdiri dari komponen pencegahan, intervensi, rehabilitasi dan reintegrasi, kebijakan dan hukum. 2. peningkatan layanan (UPTD PPA dan PUSPAGA), 3. penguatan kelembagaan (Desa/Kelurahan Ramah Anak) atau Ruang Bersama Indonesia (RBI), 4. peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak melalui KIE di media

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
							elektronik dan media social. 5. penggunaan data IPA untuk dasar kebijakan 6. Perlindungan Hukum (Menerapkan sanksi yang lebih keras bagi pelaku kekerasan terhadap anak).
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	115.9%	Tercapai	1. ketahanan keluarga yang menurun akibat tekanan ekonomi, 2. ketidakstabilan sosial, pergeseran nilai budaya, serta 3. isu-isu kependudukan seperti perkawinan anak, kesenjangan wilayah, dan 4. rendahnya kualitas SDM keluarga, yang menggerogoti aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. 5. Kurangnya Pemetaan Masalah: iBangga penting untuk memotret masalah keluarga secara detail (kemiskinan, parenting, remaja, dll.), namun jika data tidak akurat atau intervensi tidak tepat, penurunan iBangga akan terus terjadi.	upaya yang dilakukan meliputi: 1. penguatan kebijakan lintas sektor, kolaborasi dengan berbagai stakeholder 2. sosialisasi intensif program seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R melalui berbagai platform (webinar, medsos), hingga intervensi tepat sasaran untuk penurunan stunting dan 3. Menerapkan program "Quick Win" dengan peningkatan GENTING, TAMASYA, SIDAYA, GATI dan SUPER APP serta fokus pada pembinaan keluarga pada dimensi ketentraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga 4. Penguatan data keluarga 5. Peningkatan Kualitas Pengasuhan: Mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) melalui BKB, serta sosialisasi pentingnya pengasuhan yang benar. 6. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	84.6%	Tidak Tercapai	1. Kurangnya Kesadaran dan Motivasi: Masyarakat cenderung tidak berpartisipasi jika merasa kegiatan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan atau tidak menarik perhatian mereka 2. Tingkat Pengetahuan dan	1. Peningkatan Komunikasi dan Edukasi: o Edukasi tentang Pentingnya Partisipasi: Menso sialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan agar merasa memiliki dan bertanggung

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tercapai /Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Perbaikan atau Peningkatan
						Keterampilan yang Rendah: Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis menghambat kemampuan masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 3. Kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan pendekatan yang intensif dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat dapat menyebabkan ketidakpahaman akan pentingnya partisipasi mereka.	jawab atas hasilnya. o Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pemerintahan elektronik (e-Government) seperti e-Musrenbang untuk memastikan transparansi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang jelas dan merasa suaranya didengar. o Komunikasi yang Intensif: Meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan masalah lokal secara langsung. 2. Penciptaan Lingkungan Partisipatif
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nila	84.3%	Tidak Tercapai	kelemahan dalam sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, seperti target yang tidak realistis, kurangnya data pembandingan, minimnya analisis kinerja tidak digunakan untuk perbaikan, indikator kinerja tidak jelas, dan implementasi yang tidak sesuai SOP.	Melibatkan perbaikan sistematis di seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan utama berfokus pada perencanaan kinerja yang realistis, pengukuran kinerja yang akurat, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Sumber: Evaluasi Renja dan IKU DP3AKB Kota Balikpapan, 2025

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program

dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender	Persentase Anggaran yang responsif Gender	109%	Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,8%					
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	103%	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99.99%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100	100	100%
							Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1	1	100%
							Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	68	80	118%
							Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	68	80	118%
							Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	25	25	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%
							Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8.19	11.34	138%
							Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	18.67	41.76	224%
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif	84.35%	100%	119%
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota (layanan)	6	5	83%
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5	5	100%
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40	40	100%
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	113.4%	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	4	8.87	222%
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	6	100%
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	38.89	52.94	136%
							Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	14	33	236%
							Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	100%
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	70	70	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1	1	100%
							Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	30	100%
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	30	30	100%
							Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%
							Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	90	94.14	105%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	10	25.34	253.40%
							Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1020	2368	232.16%
							Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0.010%	0.07%	700.00%
							Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	110	166	150.91%
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	20	38	190.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2	2	100%
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR	89%	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	98.2%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	68	92	135.29%
							Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS			
								1. SD/MI (%)	26.04	56.82	218.20%
								2. SLTP/MTS (%)	36.14	47.62	131.77%
							Sub Kegiatan Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur NonFormal dan Informal	80	80	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1	1	100%
							Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12	12	100%
							Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2	2	100%
							Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	100%
							Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	100%
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11.25	4.28	38.04%
							Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77300	66895	86.54%
							Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	1	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	10	10	100.00%
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	3	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6	6	100.00%
							Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34	34	100.00%
							Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	34	34	100.00%
							Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	34	34	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1360	1360	100.00%
							Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	27.75	35.24	126.99%
							Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1222	1222	100.00%
							Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	100.00%
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34	34	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
3							Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
							Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	1	100%
							Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	34	34	100%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	18.35	9.4	51.23%
							Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk	9.91	8.41	84.86%
								Persentase kelompok BKR terbentuk	4.15	1.35	32.53%
								Persentase kelompok BKL terbentuk	7	4.85	69.29%
								Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2.37	2.38	100.42%
								Persentase kelompok PIK-R terbentuk	25.6	30	117.19%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	19	19	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	456	456	100.00%
							Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5	5	100.00%
							Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	20	19	95.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan	35	22.56	64.46%
							Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	1	100.00%
	Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang	Prosentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	84.6%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	34	34	100%
							Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	1	100%
							Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	2	100%
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	85550000000	89616791709	104.75%
							Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	68.57	100	145.84%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35	35	100.00%
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	12	100.00%
							Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4	4	100.00%
							Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	100.00%
							Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	84%	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.3%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	81.24	96.71%
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84.45	71.21	84.32%
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100.00%
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	77.58	92.36%
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602	677	112.46%
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82	83.43	101.74%
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	18	100.00%
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100.00%
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100.00%
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83	83.43	100.52%
							Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	6	100.00%
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84	83.43	99.32%
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00%
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	100.00%
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	83.43	100.52%
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58	58	100.00%
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	160	100.00%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.00%

Sumber : Form E.81 aplikasi REAKSI Bappeda Kota Balikpapan

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang menunjang keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah tertulis dalam perjanjian kinerja sebagaimana berikut ini:

1) Indikator dengan klasifikasi tercapai, dan sangat tercapai

Indikator-indikator dengan klasifikasi ini dapat dipertahankan program program kerja yang telah dilakukan. Berikut merupakan rincian program yang perlu dipertahankan:

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (indikator negatif)
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2) Indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dan tidak tercapai

Indikator-indikator dengan klasifikasi cukup tercapai dapat ditingkatkan kinerja programnya dan indikator dengan klasifikasi tidak

tercapai dapat dilakukan evaluasi program kerja. Berikut merupakan program-program yang perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi:

- Program Perlindungan Perempuan (indikator negatif)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun analisis untuk tiap sasaran strategis berdasarkan program yang telah dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak** dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 103%, sementara sasaran strategis **Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan** dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 99.99%, melalui pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan .

Nilai IDG ini merupakan ukuran tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diinterpretasikan dengan presentasi keterwakilan perempuan di parlemen, persentase perempuan dalam tenaga profesional sebagai pengambil keputusan dan persentase kontribusi pendapatan. Indikator ini dapat terlaksana melalui program yang berdampak / memicu capaian kinerja masing-masing sasaran yaitu:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Tingkat capaian 100%

Program PUG dilaksanakan melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian 100%, karena telah semua Perangkat Daerah mendapatkan pendampingan penyusunan PPRG dan sudah seluruh perangkat daerah menyusun PPRG dibuktikan dengan GAP GBS yang dimiliki masing-masing perangkat daerah saat asistensi RKA. Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki beberapa regulasi terkait PUG yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Juga Surat Keputusan Walikota yang mengatur tentang Kelompok Kerja PUG serta Tim Penggerak / *driver* dan tim Teknis PUG kota Balikpapan. Sejumlah 34 Perangkat Daerah juga telah memiliki Surat Keputusan tentang *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah. Dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR; penguatan SDM perencana bagi OPD melalui kegiatan pelaksanaan PPRG; pendampingan OPD dalam penyusunan PPRG serta pelaksanaan review analisis gender oleh Inspektorat sehingga mendorong OPD dalam penyusunan RKA menerapkan mekanisme PPRG.

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Indikator dan target Kinerja Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender sebesar 100%, Pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Sehingga capaian program menjadi sebesar 100% dengan predikat tercapai/sesuai target. Sebagai upaya perbaikan ke depan, DP3AKB akan memperkuat koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah dan Tim

Review RKA untuk memastikan kepatuhan OPD dalam penyusunan anggaran responsif gender.

Pada tahun 2025 juga telah menyusun Naskah Akademik tentang Perda Pengarusutamaan Gender dengan output draft Perda PUG Kota Balikpapan.

Selain itu untuk mendukung tingkat capaian program ini dilaksanakan juga advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi pada sejumlah organisasi Wanita dan pada Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diharapkan para perempuan mampu memahami perannya baik di bidang hukum, sosial dan ekonomi. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik pada Organisasi Wanita untuk memacu keterwakilan perempuan dalam parlemen menghadapi masa Pemilu.

Melalui organisasi wanita yang ada di kota Balikpapan juga dilakukan pembinaan dan pelatihan pada industri rumahan yang dikelola para perempuan sehingga mampu meningkatkan pendapatannya para perempuan

Pada tahun 2023 kota Balikpapan juga telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana Balikpapan diberi penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Madya. Kategori yang diberikan meningkat satu tingkat bila dibandingkan tahun 2021 dimana Balikpapan baru masuk kategori pertama.

2). Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian Prosentase Kecamatan yang memiliki Layanan Pusat Pembelajaran

(PUSPAGA) sebesar 222%, hal ini menggambarkan bahwa DP3AKB berupaya mendekatkan pelayanan konseling dan konsultasi oleh psikolog secara gratis yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Balikpapan yang mana selama ini bahwa pelayanan konsultasi ke psikolog dianggap hanya dapat dijangkau oleh keluarga yang mampu, sehingga dengan adanya layanan PUSPAGA yang tersebar di 6 kecamatan yaitu:

- Puskesmas Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat;
- Puspaga Harapan 3 Kantor Kecamatan Balikpapan Utara;
- Gedung Perpustakaan Arsip dan Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah
- Puspaga Harapan 1 Kantor Disdukcapil-DP3AKB
- Puspaga Harapan 2 Gedung Balai Penyuluh Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan dan
- Puspaga pada Kecamatan Balikpapan Timur



Gambar 1.11
Puspaga Kecamatan Balikpapan Timur
Sumber: Dokumentasi DP3AKB

Dengan adanya pelayanan PUSPAGA akan mendekatkan keluarga, masyarakat dan orang tua dapat melakukan konsultasi gratis terkait pengasuhan anak, remaja dan keluarga. Melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota itu memiliki tingkat capaian sebesar 222 %. Tahun 2023 Puspaga Harapan Kota Balikpapan menerima piagam penghargaan dari Kementerian PPPA sebagai Puspaga Memenuhi Standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peringkat PUSPAGA Ramah Anak.

Selain pelaksanaan konseling dilakukan langsung di PUSPAGA, petugas dari PUSPAGA juga turun langsung mengadakan konseling dan penyuluhan ke sekolah-sekolah melalui pertemuan/sosialisasi, ke lingkungan pasca bencana dan lain-lain, sehingga yang terlayani oleh PUSPAGA semakin banyak.



Gambar 1.12. Pelayanan Konseling PUSPAGA disekolah-sekolah

3). Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan tingkat capaian 136%

Pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kota Balikpapan sejumlah 18 Perangkat daerah sudah memiliki data terpilah sehingga tingkat capaian senilai 136% melebihi yang ditargetkan (14 perangkat daerah).

Adapun Perangkat daerah tersebut adalah: DP3AKB, Disdukcapil, BPBD, Disdikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, DKUMKMP, Disputakar, DP3, DPOP, Disnaker, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara.

Untuk mendukung kegiatan ini DP3AKB secara rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan data secara terpilih. Dan data terpilah sudah di tampilkan pada aplikasi Satu Data milik Kota Balikpapan

4) Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian 100 %

Kondisi ini menggambarkan dari 5 Kluster KLA (Kluster I: Hak Sipil Kebebasan, Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Kluster V: Perlindungan Khusus Anak, tambahan Kelembagaan dan Kecamatan /Desa/Kelurahan Layak Anak) dengan total 31 indikator dan 231 pertanyaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil penilaian KLA dengan memberikan rekomendasi dari 31 indikator dan 231 pertanyaan, telah ditindaklanjuti sejumlah 155 pertanyaan yang diruangkan dalam penilaian dengan total nilai evaluasi KLA adalah 732 sehingga

tahun 2025 Balikpapan mendapatkan peningkatan Predikat Kota Layak Anak semula kategori Nindya menjadi **Utama**.



Gambar 1.13. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama

Sementara Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota capaian Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina teralisasi 30 lembaga dari target sejumlah 30 Lembaga sehingga capaiannya adalah 100%, pembinaan lembaga ini terus diintensifkan karena sasaran dalam 5 tahun target Renstra 2021-2026. Selain itu juga dilakukan upaya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha tentang Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha. Pada kegiatan ini dilaksanakan pelatihan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dimana peserta yang mengikuti pelatihan diberikan sertifikasi dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan RI.

5). Program Perlindungan Khusus Anak

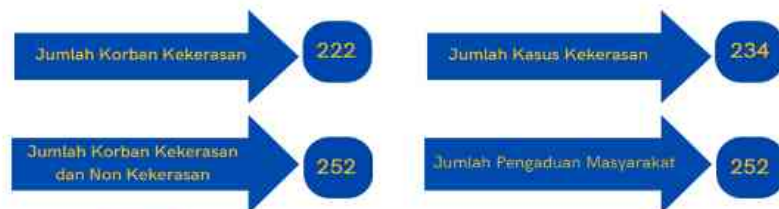
Program Perlindungan Khusus Anak dengan target Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA dengan

tingkat capaian sebesar 105%. Jumlah aduan kasus Korban kekerasan dan non kekerasan yang masuk ke UPTD PPA ada 252 aduan. Jumlah korban yang terdata adalah 166 korban kekerasan anak dan 56 korban kekerasan perempuan. Kondisi ini menggambarkan jumlah korban kekerasan selama tahun 2025 yang masuk di UPTD PPA adalah sejumlah 222 korban, yang sudah selesai penanganan sejumlah 209 korban sementara masih dalam proses penanganan sejumlah 13 korban. Oleh karenanya dengan jumlah korban yang masih dalam proses penanganan tetap menjadi tugas dari UPTD PPA dalam melakukan pendampingan. Untuk mendukung sasaran strategis ini beberapa kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota di targetkan Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak adalah 10% dari total RT sejumlah 1784 Rt dan realisasinya tercapai 25,34 %, artinya wilayah RT yang telah terpapar regulasi perlindungan anak sejumlah 452 RT.

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus target tahun 2025 adalah 0,010 % dengan realisasi 0,07 % yang artinya tidak tercapai target yang diharapkan karena melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian -700 % kondisi ini diartikan bahwa indikator kinerja ini capaiannya adalah **indikator negatif** yang seharusnya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum makin kedepan makin berkurang, namun hal ini sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi dan perkembangan kota yang berakibat dampak sosial juga makin meningkat, oleh karenanya menjadi tantangan kedepan bagi DP3AKB

hususnya UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) agar pemenuhan hak anak nya tetap dapat terpenuhi.

LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN



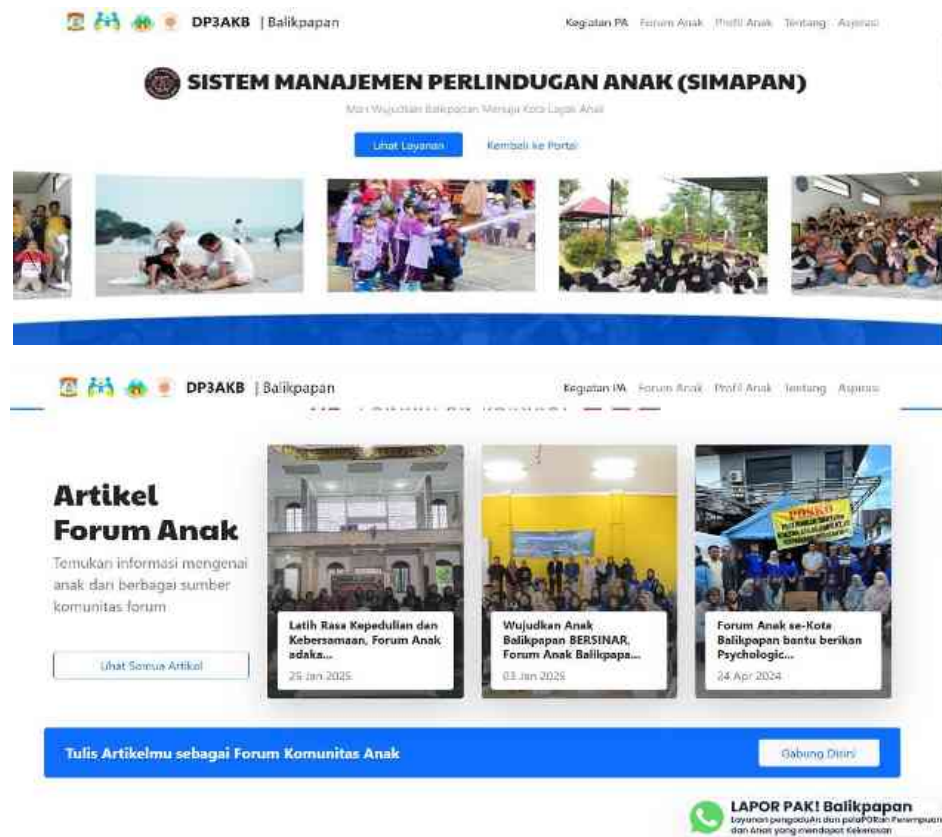
CATATAN:
Jumlah korban *tidak selalu sama* dengan jumlah kasus kekerasan, karena satu korban bisa mengalami *lebih dari satu* kekerasan.

Sumber Data: UPTD PPA Kota Balikpapan

Gambar 1.14. Tangkapan Layar pada aplikasi SIDAK KtPA

Dalam mendukung kegiatan, di bidang Perlindungan Anak memiliki beberapa Inovasi yaitu Inovasi PIN EMAS, SIMAPAN dan Lapor PAK! Inovasi PIN EMAS merupakan strategi inovasi melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Strategi ini dilaksanakan melalui pendekatan sinergitas, kolaborasi, koordinasi hexahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan Forum Anak. Sedangkan Inovasi SIMAPAN (Sistem Manajemen Perlindungan Anak) adalah pendekatan yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak dalam berbagai konteks, seperti keluarga, sekolah, komunitas dan institusi lainnya. Tujuannya adalah memberikan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan optimal mereka dan mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran atau eksploitasi. Sedangkan Inovasi Lapor Pak! merupakan Layanan Pengaduan dan Pelaporan Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan yang merupakan hotline pengaduan bagi

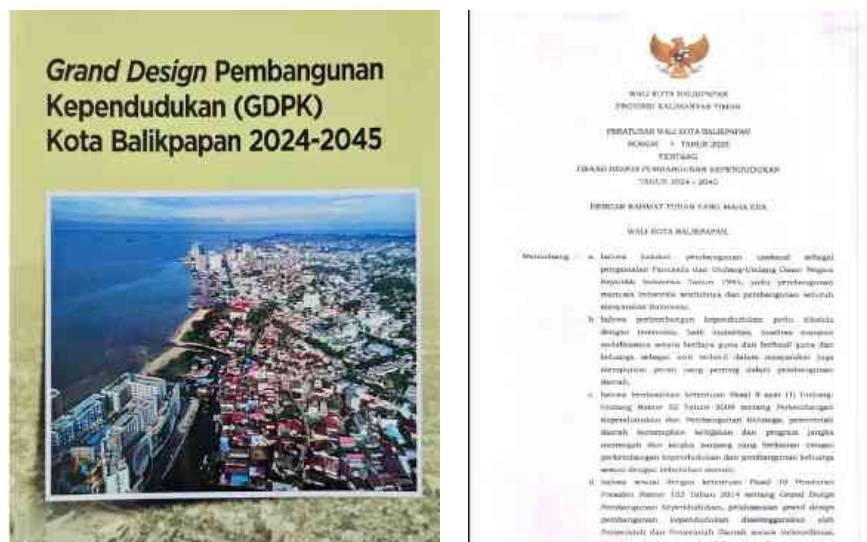
masyarakat Balikpapan terkait kekerasan pada perempuan dan anak.



Gambar 1.15.
Tangkapan layar Aplikasi SIMAPAN dan LAPOR PAK!
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB** dengan indikator kinerja Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 89%, sementara sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 98,2%, melalui pelaksanaan:
 - 1) Program pengendalian Penduduk dengan tingkat capaian sebesar 135,29%

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI yang memiliki target 26,04% dan terealisasi sebesar 56,82%. Dan untuk persentase Satuan Pendidikan Siaga kependudukan jalur formal terbentuk di jenjang SLTP/MTS target yang ditetapkan sebesar 36,14% dan berhasil terealisasi sebesar 47,62% atau tercapai 131,77 %. Selain itu ada juga kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk yang memiliki target 1 dokumen telah terealisasi dengan tersusunnya 1 (satu) dokumen Peraturan Walikota tentang **Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)** di tahun 2025.



Gambar 1.16. Perwali dan cover dokumen GDPK

- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan tingkat capaian program 38,04 %. Tapi indikator pada program ini

adalah indikator negatif artinya **semakin kecil angkanya maka akan semakin baik.**

Pada program Pembinaan KB persentase PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmet Need) sudah turun cukup signifikan yaitu 4,28%, dimana terdiri dari jumlah PUS Unmet Need 4514 PUS dari total seluruh PUS 105.403. Alasan yang dikemukakan untuk tidak ber-KB adalah alasan kesehatan, efek samping, mitos dan persepsi negatif terhadap kontrasepsi serta budaya. Nilai mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah angka prevalensi kontrasepsi modern yang meningkat walaupun masih belum mencapai target yang ditentukan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi modern sudah cukup baik. Hal ini juga terlihat dengan peningkatan persentase penggunaan KB MKJP yang telah melewati target, ini menunjukkan bahwa PUS yang menggunakan KB MKJP terus meningkat setiap tahunnya.

Kegiatan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis untuk meningkatkan kesertaan PUS ini telah dilakukan juga melalui kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Tingkat capaian 86,54%.

Kemudian kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB memiliki tingkat capaian sebesar 100%.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kepesertaan KB MKJP realisasinya adalah 126,99%,

Hal ini juga didukung penyediaan sarana penunjang pelayanan KB bersumber dari dana DAK dengan tingkat capaian 100% Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya dilakukan melalui pelaporan rutin yang disampaikan.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator Jumlah intervensi pada Kampung KB realisasinya adalah sebesar 100%. Kegiatan ini mendorong agar kampung KB mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di wilayah masing-masing. Saat sekarang jumlah kampung KB yang sudah melaksanakan Program Bangga Kencana ada 34 kampung sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

Promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang. Untuk meningkatkan kesertaan PUS dilakukan pembinaan pada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Program KKBPK di lini lapangan melalui pendayagunaan Penyuluh KB (PKB)/ Petugas Lapangan KB (PLKB). Kelompok IMP (institusi masyarakat pedesaan) sejumlah 34 kelompok sudah seluruhnya terbina oleh PKB, Kolaborasi yang baik antara PKB selaku pembina wilayah Kelurahan dengan kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor pasangan usia subur (PUS) muda.

Salah satu aktivitas penting IMP adalah membuat laporan bulanan kepada PKB/PLKB tentang:

- a. kegiatan IMP dalam melakukan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga;
- b. kegiatan IMP Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya);
- c. kegiatan IMP dalam memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya; serta
- d. intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang telah dibuat.

Kader IMP di dalam tugasannya melakukan beberapa kegiatan, seperti: pembinaan tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), Kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, fungsi keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, IMP juga melakukan pembinaan mengenai pengaturan kelahiran antara lain kondisi kesehatan ibu, jumlah anak dan jarak kelahiran.

Dalam mendukung Sasaran ke 2 ini terdapat Inovasi bidang Ketahanan Keluarga yaitu Inovasi SIRSAK (Sinergi Kolaborasi Peningkatan Pendapatan Usaha Akseptor). SIRSAK merupakan yang mensinergikan dan mengkolaborasikan program kegiatan yang berada diperangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan kelompok UPPKA dalam mengembangkan kelompok UPPKA agar lebih baik dan lebih dikenal masyarakat luas.

3. Sasaran Strategis **Meningkatnya Kelurahan Kategori berkembang** dengan indikator kinerja Persentase Kelurahan Kategori Berkembang pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 100%, sementara sasaran strategis **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan** dengan indikator kinerja Persentase

Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 84,6%, melalui pelaksanaan program :

- 1) Program administrasi pemerintahan desa dengan tingkat capaian 100%

Program ini terlaksanan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan capaian indikator jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi sebesar 100% serta

- 2) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Program ini terlaksana melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian indicator presentase lembaga masyarakat kelurahan yang diberdayakan sebesar 104,75%. Adanya dukungan surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 414.4/1193/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang penginputan Epdeskel dan pelaksanaan Lomba Desa dan kelurahan Tahun 2023, kondisi ini memacu kelurahan untuk melengkapi data Epdeskel serta dukungan dari Kecamatan untuk mensupport seluruh kelurahan dalam melakukan update data melalui aplikasi Epdeskel.



Gambar 1.17. Tangkapan layar aplikasi Epdeskel Kemendagri

Pada Lembaga Kemasyarakatan juga dilakukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, baik melalui sosialisasi, kegiatan pembelajaran praktek baik ke daerah lain. Selain itu pada seluruh kelurahan juga dilakukan fasilitasi dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dimana pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan lomba Teknologi Tepat Guna. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki Inovasi bernama **KOPY TETANGGA** (Kolaborasi Pengelolaan Posyantek dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna) yaitu upaya untuk melakukan pengelolaan Posyantek secara kolaborasi dengan instansi terkait, Kolaborasi dengan membuat payung hukum bagi Posyantek melalui Peraturan Walikota dan kolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam membuat pemetaan secara digital untuk memperkenalkan Posyantek dan mempromosikan produk Teknologi Tepat Guna, dimana outputnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di kota Balikpapan.

4. **Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan, program yang terkait dengan Sasaran Strategis ini adalah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) 96,71%.

Nilai IKM masyarakat intern(pegawai) diambil dari survey internal yang disebar keseluruh pegawai DP3AKB (ASN, Non ASN dan PKB) berdasarkan link kuisisioner yang dilakukan penilaian. Sementara untuk nilai SAKIP dilakukan penilaian oleh tim Evaluator dari Inspektorat.

Kegiatan yang menunjang program ini adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal sasaran strategis belum memenuhi target, sasaran strategis **Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DP3AKB pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 mencapai 84,3% sementara Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029 mencapai 84,3% belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pada saat penyusunan Renstra 2021-2026 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dianggap kurang SMART sehingga mempengaruhi penilaian oleh Inspektorat. Untuk tahun 2025 sudah dilakukan berbagai perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi Inspektorat melalui Laporan Hasil Evaluasi.

Program-program yang masuk kategori tidak tercapai /tidak sesuai target adalah :

1) Program Perlindungan Perempuan dengan Tingkat capaian -138% (indicator negative)

Untuk mendukung Program ini dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kota dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, penguatan kapasitas SDM bagi kader Seksi perlindungan perempuan dan anak Tingkat RT (Seksi PPA RT). Dengan kondisi dimana kegiatan dilaksanakan secara terjadwal, capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah 8,19% tercapai sebesar 11,34%, Hal ini bila dilihat dari target kinerja yang direncanakan memang tidak berhasil dikarenakan kasus kekerasan semakin meningkat seyogyanya mengalami penurunan, namun bila ditelaah lebih lanjut menjadi keberhasilan program dikarenakan masyarakat mempunyai keberanian dalam mengungkapkan/melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dilingkungannya yang selama ini dianggap tabu dan cenderung ditutupi karena adanya perasaan malu sehingga digambarkan sebagai fenomena gunung es. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi juga didukung dari aktivis PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu berbasis Masyarakat) dan seksi PPART. Disamping itu dengan meningkatnya kasus tentunya diimbangi dengan pemberian layanan penanganan korban KtPA melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana capaian Prosentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 119% , dengan pemberian layanan dan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan, baik yang sifatnya fisik, psikis, seksual dan penelantaran yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2). Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Capaian untuk program ini pada tahun 2025 adalah 9,4% dari target yang ditetapkan sebesar 18,35% sehingga capaiannya hanya sebesar 51,23%. Bahwa pada indikator kegiatan pelaksanaan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu persentase kelompok yang terbentuk, ada 3 kelompok yang tidak tercapai yaitu Kelompok BKR hanya tercapai 32,53%; kelompok BKL tercapai 69,29% dan kelompok BKB tercapai 84,86%. Kendala yang dihadapi adalah:

1. Pada pembentukan kelompok BKR, Penyuluh KB dan kader pendamping keluarga kesulitan dalam mengumpulkan ibu ibu atau keluarga yang memiliki remaja, hal ini dikarenakan kegiatan remaja tidak terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Untuk remaja ada posyandu tersendiri, hanya ada 1 posyandu di tiap kelurahan, pengurus adalah remaja itu sendiri dan lebih fokus pada masalah kesehatan.
2. Pada pembentukan kelompok BKL, mengalami kesulitan oleh karena kader sudah banyak merangkap kegiatan sehingga sulit dalam membagi waktu.
3. Pada pembentukan kelompok BKB, masih belum optimal terbentuk oleh karena keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana, sehingga wilayah binaan tiap PKB menjadi terlalu luas.

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini menyajikan penilaian efisiensi pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Uraian difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan SDM perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara jumlah, kompetensi, dan distribusi SDM dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja yang dihasilkan. Uraian difokuskan pada optimalisasi penugasan dan pemanfaatan SDM dalam menghasilkan output dan outcome kinerja secara efektif dan efisien, serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan SDM pada periode selanjutnya.

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 203 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan hanya didukung oleh 80 orang ASN (Pegawai Pemkot, PPPK dan Pegawai Pusat), dengan demikian dengan SDM hanya 80 orang dari seharusnya sekitar 203 orang dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB dinilai masih efektif.

**Tabel 3.15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) DP3AKB
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1.	Jabatan Struktural	0	7
2.	Jabatan Fungsional	1	10
3.	Jabatan Pelaksana	10	32
4.	Penyuluh KB	0	16
Jumlah		11	65

Sumber: Sub Bagian Umum DP3AKB Kota Balikpapan

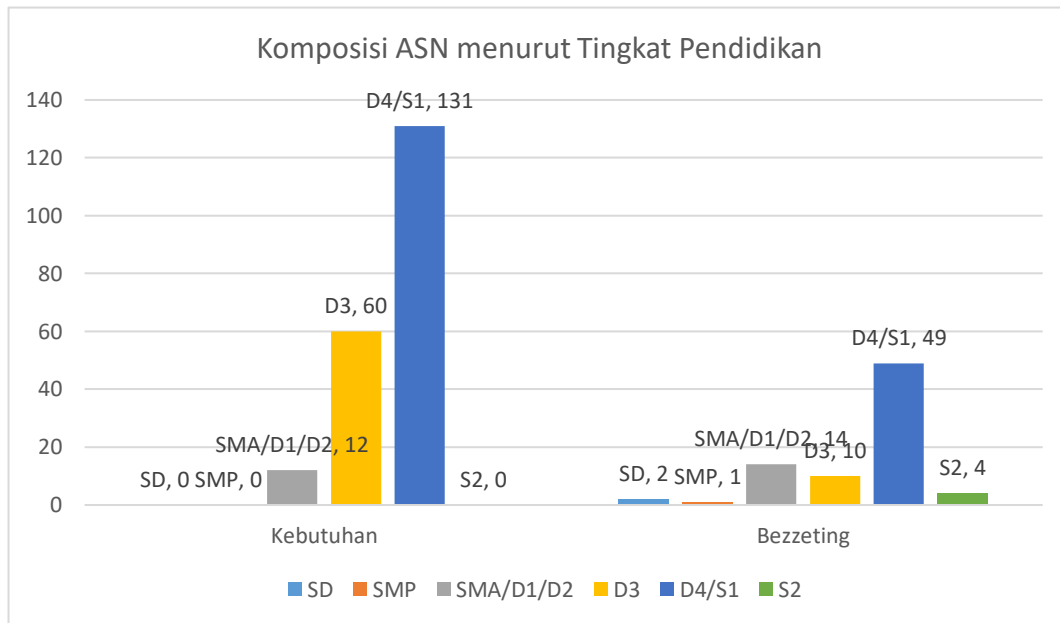
Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi

Adapun data sumber daya manusia aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:

**Tabel 3.16. Komposisi / Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS)
DP3AKB menurut tingkat pendidikan**

Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan	Persentase
SD	0	2	1%
SMP	0	1	0,5%
SMA/ D1/D2	12	14	6,9%
D3	60	10	4,9%
D4/ S1	131	49	24,1%
S2	0	4	2%
TOTAL	203	80	39,4%

Sumber: Kepegawaian DP3AKB Tahun 2025



Gambar 1.18. Diagram Komposisi /Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AKB menurut tingkat Pendidikan

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 49 orang atau 24,1 % dari target kebutuhan (203 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 14 orang atau 6,9% dari target kebutuhan kemudian disusul Diploma 3 (D3) berjumlah 10 orang atau 4,9 % dari target kebutuhan dan S2 berjumlah 4 orang atau 2 %. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada DP3AKB tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan dan untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada, penugasan rangkap dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak serta tenaga ahli untuk tenaga Psikologi Klinis, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan,

dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.17 Jumlah asset yang dimiliki dan yang tidak terpakai

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Mobil	8	1.313.393.500,00	-	-	
2	Sepeda Motor	50	1.113.721.510,00	-	-	
3	Personal Computer	55	615.243.000,00	8	51.124.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
4	Printer	45	206.854.750,00	5	6.071.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
5	Laptop	35	400.913.250,00	11	151.508.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
6	Air Conditioner	23	108.976.000,00	1	25.000.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
7	Televisi	5	89.810.000,00	1	1.000.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
8	Sound System	6	67.037.860,00	-	-	
9	CCTV	8	80.639.750,00	-	-	
10	Mesin Absensi	3	17.292.260,00	1	4.565.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
11	Kamera	3	19.316.000,00	1	11.946.000,00	Kondisi RB dan sedang proses pemusnahan dan penghapusan
12	LCD Proyektor	6	42.862.500,00	-	-	
13	Peralatan Permainan Anak	24	2.347.200.000,00	-	-	

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
14	Aset Lainnya	212	1.935.406.349,80	-	-	
	Jumlah		8.358.666.729,80		251.214.000,00	

Sumber: Sub bagian umum DP3AKB Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Sedangkan untuk mengukur Efektivitas (hasil guna) dapat diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Target Kinerja} / \text{Rencana Anggaran})}{(\text{Realisasi Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran})} \times 100 \%$$

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) untuk tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)	KET
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
								34,835,597,896	31,035,098,859			
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	APBD+DAK	73	75.04	103%	5,454,015,135	5,003,023,593	82%	11%	Efisien
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)	%	APBD DAK BANKEU	70.65	63.12	89%	6,115,961,299	5,942,845,802	97%	-9%	-
3	Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	APBD	100	100	100%	9,393,149,564	8,749,186,175	93%	7%	Efisien
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	APBD	84.45	71.21	84.32%	13,872,471,898	11,340,043,289.20	82%	3%	-

Sumber: Laporan Evaluasi Renja DP3AKB ,2025

Berdasarkan tabel 3.14 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran DP3AKB Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Berdasarkan tabel 3.14. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 1** telah mencukupi (efisien) dengan capaian kinerja 103% dan capaian penyerapan anggaran 82% sehingga terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 11%. Hal tersebut terjadi karena harga pembelian barang di pasaran lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD dan perjalanan dinas dibelanjakan sesuai kebutuhan, serta transportasi akomodasi dan honorarium narasumber disesuaikan dengan standart eselonisasi. Ada penghematan anggaran dari beberapa sub kegiatan yang dikolaborasikan dengan sub kegiatan lain.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 3** telah mencukupi (efisien) dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 93% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7 %. Efisien tersebut terjadi pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat masyarakat dan hukum adat pada kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat karena adanya LPM yang tidak merealisasikan kegiatannya dan tidak Semua LPM mengambil dana hibah yang sudah disiapkan berdasarkan usulan dan proposal hibah yang diterima oleh DP3AKB Kota Balikpapan serta harga nego pengadaan mobil jenazah yang cukup berarti.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel Tabel 3.11 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 2** terserap 97 % sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 89% . Hal tersebut terjadi karena adanya target yang tidak tercapai yaitu Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan serta Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk yang tidak mencapai target karena rendahnya minat keluarga untuk menjadi anggota Kelompok ketahanan keluarga tersebut.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 4** terserap 82% sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 84,32%, maka nilai efektifitas untuk sasaran ini adalah 3%. Hal ini terjadi karena capaian anggaran yang tersedia tidak diikuti dengan capaian kinerja yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan nilai SAKIP tahun 2024 berdasarkan penilaian hasil penilaian Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat baik dari segi Perencanaan

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas belum mencapai target. Terdapat juga efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan (Silpa Positif) yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.992.448.929,80 atau 5,71% karena ada pegawai yang pensiun dan gaji berdasarkan kondisi kerja yang tidak diserap. Kemudian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik masih ada sisa dana Rp 97.117.429 atau 0,28% yang merupakan silpa positif karena penghematan listrik, air dan telepon. Lalu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga ada penghematan sebesar Rp 123.402.264 atau 0,35% karena tenaga honorer yang harusnya dibayar pada rekening ini sudah diangkat menjadi PPPK.

Selain itu, pengukuran efisiensi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan juga didasarkan pada Renstra 2025-2029 , sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (E)	KET
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	<i>Indeks</i>	APBD DAK BANKEU	90.36	91.04	101%	34,895,597,896	31,035,098,859	89%	12%	Efisien
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	APBD DAK	75.05	75.04	99.99%	1,605,391,087	1,423,230,986	89%	11%	-
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	APBD DAK	63.75	72.33	113.5%	3,848,624,048	3,579,792,607	93%	18%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	APBD DAK BANKEU	66.6	77.2	115.9%	6,175,961,299	5,942,845,802	96%	17%	Efisien
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	APBD	81.25	68.75	84.6%	9,393,149,564	8,749,186,175	93%	3%	-
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	APBD	84.45	71.21	84.3%	13,872,471,898	11,340,043,289.20	82%	3%	-

Sumber: Laporan Evaluasi Renja DP3AKB ,2025

Berdasarkan tabel 3.15 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran DP3AKB Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Sama dengan Renstra periode sebelumnya, berdasarkan tabel 3.15. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui juga bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 1** telah mencukupi dengan capaian kinerja 99,99% dan capaian penyerapan anggaran 89% sehingga terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 11%. Pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 100% anggaran digunakan untuk mendukung peran serta perempuan dalam bidang-bidang tersebut. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG penyerapan anggaran hampir maksimal digunakan untuk mendukung kegiatan (96%).
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 2** terserap 93% dengan capaian kinerja yang 113,5%, sehingga efisiensi anggaran mencapai 18% . Hal tersebut terjadi karena beberapa upaya yang dilakukan mencakup
 - a. penguatan sistem perlindungan anak (SPA) yang responsif
 - b. peningkatan layanan (UPTD PPA, PUSPAGA)
 - c. penguatan kelembagaan (Desa/Kelurahan Ramah Anak)

- d. peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye, kolaborasi antar sektor
- e. penggunaan data IPA untuk dasar kebijakan
- f. Perlindungan Hukum (Menerapkan sanksi yang lebih keras bagi pelaku kekerasan terhadap anak)

Balikpapan juga telah meraih predikat Utama dan terus berupaya mencapai KLA, dengan kolaborasi antar dinas melalui rapat gugus tugas.

- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 3** terserap 96% sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 98,2%, maka nilai efisiensi untuk sasaran ini adalah 17%.
- 4) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 4** telah mencukupi dengan capaian kinerja 84,6% dan capaian penyerapan anggaran 93% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3%. Efisien tersebut terjadi pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat masyarakat dan hukum adat pada kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat karena harga nego yang cukup signifikan pada pengadaan mobil jenazah untuk LPM.
- 5) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian **sasaran strategis 5** terserap 82% sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang hanya 84,3%, maka nilai efektifitas untuk sasaran ini adalah 3%. Hal ini disebabkan nilai SAKIP tahun 2025 berdasarkan penilaian hasil penilaian Tim Evaluator SAKIP dari Inspektorat baik dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas belum mencapai target. Terdapat juga efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan (Silpa Positif) yaitu sub

kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.992.448.929,80 atau 5,71% karena ada pegawai yang pensiun dan gaji berdasarkan kondisi kerja yang tidak diserap. Kemudian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik masih ada sisa dana Rp 97.117.429 atau 93% yang merupakan silpa positif karena penghematan listrik, air dan telepon. Lalu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor juga ada penghematan sebesar Rp 123.402.264 atau 36,3% karena tenaga honorer yang harusnya dibayar pada rekening ini sudah diangkat menjadi PPPK.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bawah terdapat dua indikator kinerja yang bersumber dari Renstra DP3AKB Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra DP3AKB Tahun 2025–2029 diketahui terdapat tiga indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga hampir mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, dimana penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 88,94 % dari total anggaran yang dialokasikan atau **Rp 31,035,098,859.20 dari anggaran Rp 34,835,597,896**. Adapun informasi anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2025 Renstra 2021-2026

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sasaran: Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13,872,471,898	11,340,043,289	82%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,872,471,898	11,340,043,289	82%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,189,640	8,180,000	80%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,189,640	8,180,000	80%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,721,929,544	8,729,480,614	81%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,721,929,544	8,729,480,614.20	81%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,186,720,293	1,062,925,617	90%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489,761,204	436,785,440	89%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427,394,570	368,232,480	86%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,455,365	72,430,000	87%
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186,109,154	185,477,697	99.7%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	815,936,000	689,516,544	85%
7	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	815,936,000	689,516,544	85%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443,513,921	222,994,228	50%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103,893,921	6,776,492	7%
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339,620,000	216,217,736	64%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694,182,500	626,946,286	90%
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423,477,500	391,255,426	92%
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,643,000	94,232,830	76%
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146,062,000	141,458,030	97%
	SASARAN: Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	5,454,015,135	5,003,023,593	92%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	391,437,662	336,198,296	86%
7	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	165,672,662	136,003,296	82%
13	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91,938,090	64,880,000	71%
14	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	73,734,572	71,123,296	96%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
8	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225,765,000	200,195,000	89%
15	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100,765,000	75,195,000	75%
16	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	125,000,000	125,000,000	100%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	675,988,885	581,232,965	86%
9	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	269,134,300	98%
17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	269,134,300	98%
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	202,338,025	70%
18	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	202,338,025	70%
11	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,280,885	109,760,640	96%
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114,280,885	109,760,640	96%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	421,246,140	394,899,725	94%
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421,246,140	394,899,725	94%
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	421,246,140	394,899,725	94%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	116,718,400	110,900,000	95%
13	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,718,400	110,900,000	95%
21	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	116,718,400	110,900,000	95%
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,819,189,727	1,748,322,676	96%
14	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	254,868,568	97%
22	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	254,868,568	97%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
15	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,556,198,619	1,493,454,108	96%
23	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,556,198,619	1,493,454,108	96%
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,029,434,321	1,831,469,931	90%
16	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1,025,522,610	978,837,741	95%
24	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1,025,522,610	978,837,741	95%
17	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	618,623,750	83%
25	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	618,623,750	83%
18	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256,083,043	234,008,440	91%
26	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	256,083,043	234,008,440	91%
	Sasaran: Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	9,393,149,564	8,749,186,175	93%
VII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	281,659,077	259,806,973	92%
19	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281,659,077	259,806,973	92%
27	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	104,172,005	97,732,608	94%
28	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177,487,072	162,074,365	91%
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9,111,490,487	8,489,379,202	93%
20	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,111,490,487	8,489,379,202	93%
29	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,410,000,000	1,260,105,000	89%
30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,855,912,452	2,792,545,746	98%
31	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	308,784,309	293,358,785	95%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
32	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	67,048,850	63,530,000	95%
33	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4,469,744,876	4,079,839,671	91%
	Sasaran: Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	6,115,961,299	5,942,845,802	97%
IX	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	712,426,915	739,553,300	104%
21	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	286,784,300	275,049,000	96%
34	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	286,784,300	275,049,000	96%
22	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota	485,642,615	464,504,300	109%
35	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000	51,780,400	86%
36	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	363,242,615	355,148,900	98%
37	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	56,400,000	52,200,000	93%
38	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6,000,000	5,375,000	90%
X	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,135,395,534	2,071,439,516	97%
23	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	307,658,206	293,191,875	95%
39	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	50,000,000	48,287,375	97%
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	25,000,000	24,460,000	98%
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	52,800,000	51,960,000	98%
42	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149,000,206	140,665,000	94%
43	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30,858,000	27,819,500	90%
24	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	617,993,172	602,742,218	98%
44	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	272,000,000	272,000,000	100%
45	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	121,471,127	115,792,890	95%
46	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	224,522,045	214,949,328	96%
25	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	890,634,831	865,999,150	97%
47	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	660,566,000	645,093,000	98%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
48	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	230,068,831	220,906,150	96%
26	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	319,109,325	309,506,273	97%
49	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	142,037,325	136,446,273	96%
50	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	177,072,000	173,060,000	98%
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3,268,138,850	3,131,852,986	96%
27	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,434,938,850	1,342,369,238	94%
51	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	171,625,000	167,030,550	97%
52	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	473,053,160	458,760,615	97%
53	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	209,000,000	201,199,998	96%
54	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	256,954,000	251,225,363	98%
55	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	135,329,650	123,463,570	91%
56	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	188,977,040	140,689,142	74%
28	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,833,200,000	1,789,483,748	98%
57	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	606,000,000	606,000,000	100%
58	Sub Kegiatan Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	1,227,200,000	1,183,483,748	96%
TOTAL		34,895,597,896	31,035,098,859.20	88,94%

Sumber: Form E.81 Aplikasi REAKSI Bappeda Kota Balikpapan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk mendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak dari pagu Rp 5,454,015,135 terserap sebesar Rp 5,003,023,593 atau 92%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB dari pagu Rp 6,115,961,299 terserap sebesar Rp 5,942,845,802 atau 97%.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang dari pagu Rp 9,393,149,564 terserap sebesar Rp 8,749,186,175 atau 93%.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pagu Rp 13,872,471,898 terserap sebesar Rp 11,340,043,289 atau 82%.

Selanjutnya, subbab ini juga memuat analisis efisiensi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Yang membedakan dengan tabel diatas adalah sasaran strategis yang terjadi perubahan. Adapun informasi anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran DP3AKB Tahun 2025 Renstra 2025-2029

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Sasaran: Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13,872,471,898	11,340,043,289	82%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,872,471,898	11,340,043,289	82%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,189,640	8,180,000	80%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,189,640	8,180,000	80%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,721,929,544	8,729,480,614	81%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,721,929,544	8,729,480,614.20	81%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,186,720,293	1,062,925,617	90%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489,761,204	436,785,440	89%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427,394,570	368,232,480	86%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83,455,365	72,430,000	87%
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186,109,154	185,477,697	99.7%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	815,936,000	689,516,544	85%
7	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	815,936,000	689,516,544	85%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443,513,921	222,994,228	50%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103,893,921	6,776,492	7%
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339,620,000	216,217,736	64%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694,182,500	626,946,286	90%
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423,477,500	391,255,426	92%
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,643,000	94,232,830	76%
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146,062,000	141,458,030	97%
	SASARAN: Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	1,605,391,087	1,423,230,986	89%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	391,437,662	336,198,296	86%
6	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	165,672,662	136,003,296	82%
13	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91,938,090	64,880,000	71%
14	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	73,734,572	71,123,296	96%
7	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225,765,000	200,195,000	89%
15	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100,765,000	75,195,000	75%
16	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	125,000,000	125,000,000	100%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	675,988,885	581,232,965	86%
8	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	269,134,300	98%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274,418,000	269,134,300	98%
9	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	202,338,025	70%
18	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	287,290,000	202,338,025	70%
10	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,280,885	109,760,640	96%
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114,280,885	109,760,640	96%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	421,246,140	394,899,725	94%
11	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421,246,140	394,899,725	94%
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	421,246,140	394,899,725	94%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	116,718,400	110,900,000	95%
12	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,718,400	110,900,000	95%
21	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	116,718,400	110,900,000	95%
	SASARAN: Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	3,848,624,048	3,579,792,607	93%
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,819,189,727	1,748,322,676	96%
13	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	254,868,568	97%
22	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262,991,108	254,868,568	97%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
14	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,556,198,619	1,493,454,108	96%
23	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,556,198,619	1,493,454,108	96%
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,029,434,321	1,831,469,931	90%
15	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1,025,522,610	978,837,741	95%
24	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1,025,522,610	978,837,741	95%
16	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	618,623,750	83%
25	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747,828,668	618,623,750	83%
17	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256,083,043	234,008,440	91%
26	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	256,083,043	234,008,440	91%
	Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	9,393,149,564	8,749,186,175	93%
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	281,659,077	259,806,973	92%
18	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281,659,077	259,806,973	92%
27	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	104,172,005	97,732,608	94%
28	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177,487,072	162,074,365	91%
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9,111,490,487	8,489,379,202	93%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
19	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,111,490,487	8,489,379,202	93%
29	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1,410,000,000	1,260,105,000	89%
30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,855,912,452	2,792,545,746	98%
31	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	308,784,309	293,358,785	95%
32	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	67,048,850	63,530,000	95%
33	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4,469,744,876	4,079,839,671	91%
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	6,175,961,299	5,942,845,802	96%
X	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	772,426,915	739,553,300	96%
20	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	286,784,300	275,049,000	96%
34	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	286,784,300	275,049,000	96%
21	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	485,642,615	464,504,300	96%
35	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000	51,780,400	86%
36	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	363,242,615	355,148,900	98%
37	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	56,400,000	52,200,000	93%
38	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6,000,000	5,375,000	90%
XI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,135,395,534	2,071,439,516	97%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
22	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	307,658,206	293,191,875	95%
39	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	50,000,000	48,287,375	97%
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	25,000,000	24,460,000	98%
41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	52,800,000	51,960,000	98%
42	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149,000,206	140,665,000	94%
43	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30,858,000	27,819,500	90%
23	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	617,993,172	602,742,218	98%
44	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	272,000,000	272,000,000	100%
45	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	121,471,127	115,792,890	95%
46	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	224,522,045	214,949,328	96%
24	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	890,634,831	865,999,150	97%
47	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	660,566,000	645,093,000	98%
48	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	230,068,831	220,906,150	96%
25	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	319,109,325	309,506,273	97%
49	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	142,037,325	136,446,273	96%
50	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	177,072,000	173,060,000	98%

NO.	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
XII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3,268,138,850	3,131,852,986	96%
26	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,434,938,850	1,342,369,238	94%
51	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	171,625,000	167,030,550	97%
52	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	473,053,160	458,760,615	97%
53	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	209,000,000	201,199,998	96%
54	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	256,954,000	251,225,363	98%
55	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	135,329,650	123,463,570	91%
56	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	188,977,040	140,689,142	74%
27	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,833,200,000	1,789,483,748	98%
57	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	606,000,000	606,000,000	100%
58	Sub Kegiatan Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon pus, ibu hamil, pasca/kelahiran, baduta/balita)	1,227,200,000	1,183,483,748	96%
	TOTAL	34,895,597,896	31,035,098,859.20	88.94%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran untuk mendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan dari pagu Rp 1,605,391,087 terserap sebesar Rp 1,423,230,986 atau 89%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak dari pagu Rp 3,848,624,048 terserap sebesar Rp 3,579,792,607 atau 93%.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dari pagu Rp 6,175,961,299 terserap sebesar Rp 5,942,845,802 atau 96%.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dari pagu Rp 9,393,149,564 terserap sebesar Rp 8,749,186,175 atau 93%.

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pagu Rp 13,872,471,898 terserap sebesar Rp 11,340,043,289 atau 82%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana kerja Wali Kota terpilih. DP3AKB Kota Balikpapan telah melaksanakan seluruh Program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah DP3AKB, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disusun.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU ada yang telah tercapai atau melebihi target, tapi ada dua yang belum tercapai. Rata-rata hampir mencapai 100% atau kinerja kriteria sangat tinggi.

B. SARAN

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB Tahun 2025 yang sudah diulas dalam dokumen ini, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DP3AKB untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai DP3AKB untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan mempelajari /memahami serta meimplementasikan regulasi teknis terkait tupoksi masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD dapat dilakukan secara efektif dan efisien ;

- b. Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak, mengingat meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tahun 2025, meskipun ada kemungkinan juga bahwa meningkatnya jumlah data korban karena semakin banyak warga/ korban yang berani melapor yang merupakan efek gencarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta keberadaan lembaga layanan penanganan kasus yang dikelola UPTD PPA Pemerintah Kota Balikpapan dan paling penting adalah ketegasan penerapan hukum kepada pelaku terkait kekerasan.
- c. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan akan disesuaikan dengan Dokumen Renstra OPD DP3AKB Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya. Untuk capaian yang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2025 sudah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerjanya menyesuaikan capaian tahun berjalan.

Demikian dokumen Pelaporan Kinerja DP3AKB Tahun 2025 ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala DP3AKB Kota Balikpapan

Nursyamsiarni Djufri Larose



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN****DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB)**Jl. MT. HARYONO RI.26 NOMOR 186 KELURAHAN SUNGAINANGKA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN,
KOTA BALIKPAPANTelp. dan fax: (0542) 424808 Email : dppakbkotabalikpapan@yahoo.com / dp3akbbalikpapan18@gmail.com

Kode Pos : 76114

**KEPUTUSAN
KEPALA DP3AKB
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46-242/DP3AKB-SKT****TENTANG
PERUBAHAN KE III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021 – 2026****KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
 - Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program dan kegiatan dan untuk memenuhi standar penilaian akuntabilitas perlu dilakukan review terhadap Definisi operasional indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DP3AKB
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.
 - Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Keputusan KEPALA DP3AKB tentang Perubahan Ke III Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 Juli 2024



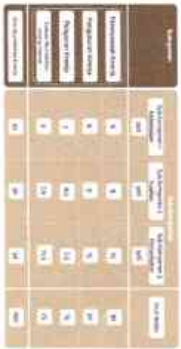


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN

Lampiran
Nomor : 188.46 - 242/DP3AKB-SKT
Tanggal : 02 Juli 2024

: Keputusan Kepala DP3AKB
: 188.46 - 242/DP3AKB-SKT
: 02 Juli 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Indikator digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi Politik, pengambilan keputusan dan partisipasi ekonomi	$1/3 (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{linc-dist})$; Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	BPS	
2	Meningkatnya Kesetaraan PUS ber-KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) * 100	%	Penggunaan indikator kinerja seperti itu adalah bahwa untuk mengukur sampai sejauh mana kesetaraan PUS ber-KB meningkat adalah dengan alat ukur perhitungan prosentase pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS (CPR)	Jumlah peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100 peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan	Dallap (laporan Pengendalian Lapangan) yang dimiliki oleh DP3AKB	Cukup Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
3	Meningkatnya Keluruhan Kategori Berkembang	Persentase Keluruhan Kategori Berkembang	%	Tingkat perkembangan keluruhan merupakan status tertentu dari capaian hasil dari keluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah Keluruhan Kategori berkembang dibagi jumlah keluruhan dikali 100	Lampiran Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa atau Kelurahan	Indikator data dan nilai perkembangan desa
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat).	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : 	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Cukup jelas

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Juli 2024


HENDRI PRISMI

Lampiran 2. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN****DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AKB)**Jl. MT. HARYONO RL26 NOMOR 186 KELURAHAN SUNGAINANGKA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN,
KOTA BALIKPAPANTelp. dan fax : (0542) 424808, Email : dp3akbkotabalikpapan@yahoo.com / dp3akbbalikpapan18@gmail.com
Kode Pos : 76114**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 100.3.3.7-04 /DP3AKB-SKT****TENTANG****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025-2029****KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan setiap tahun perencanaannya;
 2. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
 7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

KETIGA :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan dalam menyusun:

KEEMPAT :

- a. Rencana kerja dan anggaran;
 - b. Penetapan kinerja;
 - c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja; dan
 - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala DP3AKB



NURSYANSIARNI DJUFRIL LAROSE

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala DP3AKB
 Nomor : 100.3.3.7-04 /DP3AKB-SKT
 Tanggal : 2 Januari 2026
 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
 Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029**

No.	Indikator (Tujuan & Sasaran)	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai kesenjangan antara pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.	Untuk menghitung IPG, perlu menghitung IPM (laki-laki dan perempuan), kemudian membandingkan nilai IPM perempuan dengan IPM laki-laki untuk melihat perbedaan atau kesenjangan. $IPG = (IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta dalam pengambilan keputusan.	$IDG = \frac{\text{Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen} + \text{Indeks Perempuan Profesional} + \text{Indeks Kontribusi Pendapatan Perempuan}}{3}$
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	ukuran yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	IPA dihitung berdasarkan pada lima klaster hak anak, yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA kemudian dihitung dengan menggabungkan nilai IPHA dan IPKA
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	Ukuran kualitas keluarga yang diukur melalui tiga dimensi: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia, dengan 17 variabel yang tergabung dalam tiga dimensi tersebut.	Tata cara penghitungan iBangga ditetapkan oleh Kepala BKKBN. $iBangga = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$

No.	Indikator (Tujuan & Sasaran)	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	Definisi operasional kualitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada pengukuran dan penilaian tingkat keberdayaan masyarakat melalui indikator-indikator yang spesifik dan terukur. Ini melibatkan identifikasi perubahan positif dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, sebagai hasil dari upaya pemberdayaan.	$\frac{\text{Jumlah lomba yang dimenangkan oleh lembaga kemasyarakatan}}{\text{Jumlah lomba yang diikuti}} \times 100\%$
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	hasil akhir dari evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana perangkat daerah tersebut telah menerapkan manajemen kinerja yang efektif	Penilaian Inspektorat. (Integrasi dari dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja)

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal: 2 Januari 2026
Kepala DP3AKB

 NURSYAMSIRNI DJUFRI LAROSE

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURSYAMSIARNI DJUFRIL LAROSE, S.T.
**Jabatan : PIL KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.
Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 23 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,


Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PIHAK PERTAMA,


NURSYAMSIARNI DJUFRIL LAROSE, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,04	75,05
2	Meningkatnya Kesertaan PUS ber-KB	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	64,45	70,65
3	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	Nilai	64,64	84,45

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.872.471.898	APBD-P
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 391.437.662	APBD-P
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 675.986.885	APBD-P + DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 421.246.140	APBD-P
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 116.718.400	APBD-P
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 1.819.189.727	APBD-P
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 2.329.434.321	APBD-P + DAK
8.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 281.659.077	APBD-P
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 9.111.490.487	APBD-P

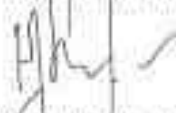
10. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	772.426.915	APSD-P + DAK BOKB
11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	2.135.395.534	APSD-P + DAK BOKB
12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	3.298.138.850	APSD-P + DAK BOKB+BANKEU
Jumlah Anggaran		Rp.	34.895.597.896

Balikpapan, 4 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Dr. H. RAHMAO MAS'UD, S.E., M.E.

Plt. KEPALA DP3AKB
KOTA BALIKPAPAN,

NURSYAMSIARNI DJUFRI LAROSE, S.T.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
ATAS RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masyarakat yang Berdaya dan Setara Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,34	90,36
1.1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,04	75,05
1.2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,74	63,75
1.3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,43	66,8
1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berdaya pada Tingkat Provinsi/Nasional	%	81,25	81,25
1.5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,64	64,45

Balikpapan, 13 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,


 Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

PH. KEPALA DP3AKB
KOTA BALIKPAPAN,


 NURSYAMSIARNI DJUFRIL LAROSE, S.T.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kepala Dinas Pembedayaan
Pemerintahan Perilaku Anak dan
Kekayaan Bismar



Dr. Hilda Pitaru

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				602 Orang/bul an	602 Orang/bul an	7.711.446.905,00	9.839.857.819,00	10.521.929.544,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sisa Belanja Lainnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			7.931.122.490,00	DP3AKB					
	2	0 8	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			82 Nilai	82 Nilai	1.425.278.755,00	1.425.278.755,00	1.425.278.755,00			-	-	-		1.836.533.655,00	DP3AKB				
	2	0 8	0 1	2.0 6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		700.000.000,00	DP3AKB		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	13 Paket	532.499.512,00	532.499.512,00	489.761.204,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBjT)	-	-			540.000.000,00	DP3AKB					
	2	0 8	0 1	2.0 6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	430.561.395,00	430.561.395,00	427.394.570,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBjT)	-	-			540.000.000,00	DP3AKB					
	2	0 8	0 1	2.0 6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
																							13	14
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	89.999.540,00	89.999.540,00	83.455.365,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	-			146.533.655,00	DP3AKB		
	2	0	0	2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	372.218.308,00	372.218.308,00	186.109.154,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	-			450.000.000,00	DP3AKB		
	2	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		83 Nilai	83 Nilai	757.872.000,00	757.872.000,00	757.872.000,00			-	-	-		850.000.000,00	DP3AKB		
	2	0	0	2.0	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	757.872.000,00	757.872.000,00	815.936.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			850.000.000,00	DP3AKB		
	2	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		84 Nilai	84 Nilai	351.931.200,00	351.931.200,00	351.931.200,00			-	-	-		503.620.000,00	DP3AKB		
	2	0	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.311.200,00	74.311.200,00	103.893.921,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			226.000.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	277.620.000,00	277.620.000,00	339.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			277.620.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Dserah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			83 Nilai	83 Nilai	822.281.500,00	822.281.500,00	822.281.500,00			-	-	-		1.050.000.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				58 Unit	58 Unit	497.638.500,00	497.638.500,00	423.477.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			650.000.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				160 Unit	160 Unit	124.643.000,00	124.643.000,00	124.643.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			200.000.000,00	DP3AKB

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	0	0	2.0	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	146.062.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			200.000.000,00	DP3AKB						
2	2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender			100 %	100 %	930.000.000,00	577.064.000,00	391.437.662,00							1.480.000.000,00							
	2	0	0	2.0		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	-		1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000,00	279.900.000,00	279.900.000,00			-	-	-		650.000.000,00	DP3AKB						
	2	0	0	2.0	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																						
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				34 Orang	68 Orang	275.000.000,00	149.900.000,00	91.938.090,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			0,00	DP3AKB						
	2	0	0	2.0	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																						
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				34 Orang	68 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	73.734.572,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			650.000.000,00	DP3AKB						

No	Kode					Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	0	0	2.0		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumah yang dibina	-			25 Industri Rumah	25 Industri Rumah	525.000.000,00	297.164.000,00	297.164.000,00			-	-	-		830.000.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	172.164.000,00	100.765.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			575.000.000,00	DP3AKB	
	2	0	0	2.0	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			255.000.000,00	DP3AKB	
3	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan				8.19 per 100.000 Penduduk Perempua n	8.19 per 100.000 Penduduk Perempua n	420.000.000,00	837.290.000,00	675.988.885,00							1.184.545.991,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	-			18.67 %	18.67 %	300.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00			-	-	-		866.632.928,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	430.000.000,00	274.418.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-			866.632.928,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	-			-	84,35 %	0,00	287.290.000,00	287.290.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Layanan	0,00	287.290.000,00	287.290.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00		DP3AKB			
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Lembaga	5 Lembaga	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		-	-	-		317.913.063,00		DP3AKB			
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	114.280.885,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			317.913.063,00	DP3AKB			
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)			100 %	100 %	775.000.000,00	683.038.370,00	421.246.140,00							1.701.605.368,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENTA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENTA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	0	0	2.0		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	-			4 %	4 %	775.000.000,00	683.038.370,00	683.038.370,00			-	-	-		1.701.605.368,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	6 Dokumen	775.000.000,00	683.038.370,00	421.246.140,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-				1.701.605.368,00	DP3AKB
5	2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah				38,89 %	38,89 %	225.000.000,00	160.369.195,00	116.718.400,00							369.131.772,00	
	2	0	0	2.0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	-			14 OPD	14 OPD	225.000.000,00	160.369.195,00	160.369.195,00			-	-	-		369.131.772,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	160.369.195,00	116.718.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-				369.131.772,00	DP3AKB
6	2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA				70 %	70 %	1.631.430.812,00	1.466.030.812,00	1.819.189.727,00							1.137.334.282,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	0	0	2.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	530.652.108,00	365.252.108,00	365.252.108,00			-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang ungg u l, sehat dan berda ya saing	Masya rakat Kota Balikpa pan		581.304.282,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					30 Organisasi	30 Organisasi	530.652.108,00	365.252.108,00	262.991.108,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (B0NKb)	-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang ungg u l, sehat dan berda ya saing			581.304.282,00	DP3AKB

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	-			30 Lembaga Penyedia Layanan	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.100.778.704,00	1.100.778.704,00	1.100.778.704,00			-	-	Lemba ga Penye dia Layana n dan SDM Lemba ga Penye dia Layana n		556.030.000,00	DP3AKB
	2	0	0	2.0	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.																	
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.778.704,00	1.100.778.704,00	1.556.198.619,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			556.030.000,00	DP3AKB	
7	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA			70 %	90 %	1.998.739.188,00	2.222.539.188,00	2.029.434.321,00							2.085.706.623,00		
	2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	-			10 %	10 %	841.110.188,00	1.079.607.188,00	1.079.607.188,00			-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang ungg u l, sehat	-		819.213.623,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		dan berdaya saing					
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					250 Orang	1020 Orang	841.110.188,00	1.079.607.188,00	1.025.522.610,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		819.213.623,00	DP3AKB	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-			-	0.010 %	820.000.000,00	820.000.000,00	820.000.000,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		875.000.000,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target - Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah PenangBB ung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		ya saing					
	2	0 8	0 7	2.0 2	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan					110 Orang	110 Orang	820.000.000,00	820.000.000,00	747.828.668,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang unggu l, sehat dan berda ya saing		875.000.000,00	DP3AKB	
	2	0 8	0 7	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	-			20 Jumlah Lembaga	20 Jumlah Lembaga	337.629.000,00	322.932.000,00	322.932.000,00			-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang unggu l, sehat dan berda	Masya rakat Kota Balikpa pan	391.493.000,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		ya saing						
	2	0 8	0 7	2.0 3	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK					2 Kegiatan	2 Kegiatan	337.629.000,00	322.932.000,00	256.083.043,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang unggul, sehat dan berda ya saing			391.493.000,00	DP3AKB	
	2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.477.561.353,00	7.609.208.294,00	9.393.149.564,00					4.466.317.722,00				
8	2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi				100 %	100 %	800.000.000,00	738.737.405,00	281.659.077,00							1.366.317.722,00		
	2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	-			34 Jumlah Kelurahan	34 Jumlah Kelurahan	800.000.000,00	738.737.405,00	738.737.405,00				-	-	-		1.366.317.722,00	DP3AKB
	2	1 3	0 4	2.0 1	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	34 Dokumen	325.000.000,00	263.737.405,00	104.172.005,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			608.146.812,00	DP3AKB
	2	1	0	2.0	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	475.000.000,00	475.000.000,00	177.487.072,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			758.170.910,00	DP3AKB
9	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan				85550000 000 Rp	85550000 000 Rp	5.677.561.353,00	6.870.470.889,00	9.111.490.487,00							3.100.000.000,00	
	2	1	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	-			68.57 %	68.57 %	5.677.561.353,00	6.870.470.889,00	6.870.470.889,00			-	-	-		3.100.000.000,00	DP3AKB
	2	1	0	2.0	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				35 Dokumen	35 Dokumen	610.000.000,00	1.210.000.000,00	1.410.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			0,00	DP3AKB	
	2	1	0	2.0	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	12 Lembaga	2.372.561.353,00	1.965.470.889,00	2.855.912.452,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-			2.150.000.000,00	DP3AKB	
	2	1	0	2.0	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	795.000.000,00	795.000.000,00	308.784.309,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			525.000.000,00	DP3AKB	
	2	1	0	2.0	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	67.048.850,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-			425.000.000,00	DP3AKB	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	1	0	2.0	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																						
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	2.600.000.000,00	4.469.744.876,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Belanja Lainnya Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			0,00	DP3AKB						
	2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.963.268.647,00	7.021.550.141,00	6.175.961.299,00					1.115.174.594,00	DP3AKB								
10	2	1	0	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk			68 %	68 %	1.021.183.462,00	1.143.583.462,00	772.426.915,00							0,00	DP3AKB						
	2	1	0	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijang SD/ MI Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijang SLTP/ MTS	-		26,04 % 36,14 %	26,04 % 36,14 %	371.183.462,00	371.183.462,00	371.183.462,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		0,00	DP3AKB						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Ketemp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	1 4	0 2	2.0 1	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	371.183.462,00	371.183.462,00	286.784.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	DP3AKB		
	2	1 4	0 2	2.0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	-		1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	772.400.000,00	772.400.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	DP3AKB			
	2	1 4	0 2	2.0 2	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi		0,00	DP3AKB		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Sistem Informasi Keluarga									Semua Kel/Desa			Pemerintah yang Bersih Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	363.242.615,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bersih Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DP3AKB
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	2 Laporan	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bersih			0,00	DP3AKB

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					
	2	1	0	2.0	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DP3AKB
11	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)				11.25 %	11.25 %	1.037.466.538,00	2.212.415.068,00	2.135.395.534,00							1.115.174.594,00	
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	-			77.300 PUS	77.300 PUS	145.934.176,00	307.658.206,00	307.658.206,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Masyarakat Kota Balikpapan		170.000.000,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2.					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		entasi Pelaya nan Publik								
	2	1	0	2.0	0008	Pengendalian Program KKBPK																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih , Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik			50.000.000,00	DP3AKB			
	2	1	0	2.0	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					-	10 Laporan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggari Raya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang unggu l, sehat dan berda			0,00	DP3AKB			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			ya saing				
	2	1 4	0 3	2.0 1	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	1 Laporan	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih + Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik			0,00	DP3AKB	
	2	1 4	0 3	2.0 1	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	95.934.176,00	149.000.206,00	149.000.206,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih + Profes ional dan			120.000.000,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		Berorientasi Pelayanan Publik							
	2	1	0	2.0	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	6 Organisasi	0,00	30.858.000,00	30.858.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	DP3AKB			
	2	1	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	-			34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	417.495.037,00	689.495.037,00	689.495.037,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	Masyarakat Kota Balikpapan	445.174.594,00	DP3AKB			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		nan Publik								
	2	1 4	0 3	2.0 2	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																				
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	1360 Orang	0,00	272.000.000,00	272.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih / Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik		0,00		DP3AKB				
	2	1 4	0 3	2.0 2	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																				
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				12 Organisasi	34 Organisasi	170.210.992,00	170.210.992,00	121.471.127,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBANKB)	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih / Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik		145.174.594,00		DP3AKB				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	1	0	2.0	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																				
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				34 Laporan	34 Laporan	247.284.045,00	247.284.045,00	224.522.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih & Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00	DP3AKB				
	2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	-			27.75 %	27.75 %	332.000.000,00	896.152.500,00	896.152.500,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih & Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan		350.000.000,00	DP3AKB			
	2	1	0	2.0	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																				

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	1222 Orang	0,00	660.566.000,00	660.566.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00	DP3AKB
	2	1 4	0 3	2.0 3	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	332.000.000,00	235.586.500,00	230.068.831,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00	DP3AKB
	2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Jumlah intervensi pada Kampung KB	-			34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	142.037.325,00	319.109.325,00	319.109.325,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Masyarakat Kota Balikpapan		150.000.000,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Pembinaan Kesertaan Ber-KB												Bersih , Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik						
	2	1 4	0 3	2.0 4	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB					34 Laporan	1 Laporan	142.037.325,00	142.037.325,00	142.037.325,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih , Profes ional dan Berori entasi Pelaya nan Publik		150.000.000,00	DP3AKB		
	2	1 4	0 3	2.0 4	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					-	34 Kampung	0,00	177.072.000,00	177.072.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	-	Mewu judka n Birokr asi Pemer intaha n yang Bersih , Profes ional dan		0,00	DP3AKB		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Berorientasi Pelayanan Publik					
12	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan				20,35 Persen	18,35 Persen	1.904.618.647,00	3.665.551.611,00	3.268.138.850,00						0,00		
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk Persentase kelompok BKL terbentuk Persentase kelompok BKR terbentuk Persentase kelompok PIK-R terbentuk Persentase kelompok UPPKA terbentuk	-			2 % 25.60 % 4.15 % 7 % 9.91 %	2 % 25.60 % 4.15 % 7 % 9.91 %	1.904.618.647,00	1.832.351.611,00	1.832.351.611,00			Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Meningkatkan Pemerintahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA	0,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	generasi Z), dan penyan- dang disabilit as.						
	2	1 4	0 4	2.0 1	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	171.625.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembantuan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Meningkatkan Pemerintahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		si milennial dan generasi Z], dan penyan dang disabilit as.						
	2	1	0	2	0	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	473.053.160,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan	-			0,00		DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		dang disabilit as.					
	2	1 4	0 4	2.0 1	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					33 Unit	19 Unit	300.000.000,00	227.732.964,00	209.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Mempe rkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan, kesehat an, prestasi olahrag a, kesetara an gender, serta penguat an peran peremp uan, pemuda (genera si milenial dan generasi	Menin gkatka n Pemer ataan Kualit as Sumb er Daya Manu sia yang unggul l, sehat dan berda ya saing			0,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dari Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penanggg ung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyan dang disabilit as.					
	2	1 4	0 4	2.0 1	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					456 Orang	456 Orang	379.326.913,00	379.326.913,00	256.954.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatkan Pemerintahan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode: Rencana OPD	Realisasi Capaian RENTA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENTA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		2), dan penyandang disabilitas.					
	2	14	04	2021	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	5 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	135.329.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saling			0,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Z), dan penyandang disabilitas.					
	2	1 4	0 4	2.0 1	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				20 Kelompok	17 Kelompok	300.291.734,00	300.291.734,00	188.977.040,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saling			0,00	DP3AKB	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Z), dan penyan dang disabilit as.					
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Beresiko Stunting Yang Mendapatkan Pendampingan Dan Pemantauan	-			-	35 Persen	0,00	1.833.200.000,00	1.833.200.000,00			Mempe rkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan, kesehat an, prestasi olahrag a, kesetara an gender, serta penguat an peran peremp uan, pemuda (genera si milenial dan generasi Z), dan penyan dang.	-	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA		0,00	DP3AKB

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka 1 Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		disabilitas.					
	2	1	0	2.0	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					-	1 laporan	0,00	606.000.000,00	606.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah	-			0,00	DP3AKB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		disabilitas.						
	2	1	0	2.0	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	1.227.200.000,00	1.227.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	-			0,00	DP3AKB		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyandang disabilitas.					
	JUMLAH										27.500.000.000,00	33.784.500.914,00	34.695.597.896,00								25.711.092.497,00		

Lampiran 6. Form E-81 TW 4 Tahun 2025

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Reraja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Reraja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2025 - Triwulan I

No.	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Rangka PD Tahun Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Peninggal Daerah s.d Rangka PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Rangka PD Tahun berjalan yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rangka PD yang direalisasi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rangka Peninggal Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Rangka PD yang direalisasi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Rangka PD yang direalisasi		Uraian Peninggal Daerah Peninggal Jumlah Peninggal Daerah s.d Tahun 2025 (%)	Uraian Peninggal Daerah Peninggal Jumlah Peninggal Daerah s.d Tahun 2025 (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang dibuat melalui mekanisme Penetapan Penganggaran Regional Gender (PRG)	Persentase RKA Regional Gender yang	%	25	74,83	13	8	8	9	9	8	8	74,83	236,12			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perhitungan di TW II				
1.1	PROGRAM PENGARUBUTAMAAN GENDER DAN PEMBUDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang telah melakukan Penganggaran Anggaran yang Responsif Gender	%	100	2.983.730.000	91,18	3.134.943.888	100	877.864.000	100	3.760.000	0		100	3.730.000	100	9,88	100	2.138.683.888	100	74,88	34 OPD telah melakukan penganggaran anggaran tahun 2025 yang responsif gender
1.1.1	Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemusatan Kemasyarakatan KabupatenKute	Dibentuk Tim/Unit yang melakukan pelaksanaan PUG	document	8	1.763.730.000	5	1.931.889.191	1	379.989.888	0	3.760.000	0	0	0	3.760.000	0	1,34	5	1.927.456.191	88	58,14	Dibekukan di TW IV
1.1.1.1	Aktivasi Kader dan Pendampingan Pengembangan PUG kewenangan KabKute	Jumlah SDM yang menjadi aktivasi kader dan Pendampingan Pengembangan PUG	Orang					34	140.980.000	0	3.760.000	0	0	0	3.760.000	0	2,5					Ditakutkan pada TW II
1.1.1.2	Strategis kegiatan penyelenggaraan PUG kewenangan KabKute	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan penyelenggaraan PUG tingkat KabKute	Orang					34	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					Ditakutkan pada TW II
1.1.2	Pembudayaan Perempuan Bidang Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan KabupatenKute	Jumlah Individu Perempuan yang aktif	Individu Perempuan	112	1.108.098.000	89	1.113.284.701	26	387.194.888	0	0	0	0	0	1.113.284.701	82,1	81,2					Ditakutkan pada TW II
1.1.2.1	Strategis Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KabupatenKute	Dokumen					1	172.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0					Ditakutkan pada TW II
1.1.2.2	Aktivasi Kader dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Aktivasi dan Pendampingan Partisipasi Perempuan di Bidang Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KabupatenKute	organisasi					1	129.500.000	1	0	0	0	0	1	102	0					Telah dilaksanakan di TW I , Aktivasi Kader dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dan Publik, Hukum, Sosial dan Ekonomi tingkat pemerintah telah ke pada tingkat desa, tahun 2025 expansion Aranyan
1.2	PROGRAM PELENDINGAN PEREMPUAN	Rasio Ketersertaan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01	3.088.250.000	48,82	3.498.719.222	8,18	837.280.000	8,91	163.372.848	0	0	8,91	183.372.848	91,21	21,88	8,91	3.896.047.942	111,34	171,82	Total korban perempuan yang terdampak trigge aksi seksual / aksi 33 orang dan telah mendapat pemulihan, 372.388. Gila dikumpulkan bulanan dan dilaporkan secara komusial
1.2.1	Peningkatan Nominasi terhadap Perempuan Lingkup Sosial KabupatenKute	Persentase Calon RT/ RW yang Responsif Perhitungan Perempuan	%	74,88	1.319.310.000	37	2.997.406.719	18,87	408.080.000	0	0	0	0	0	0	0	37	2.897.406.719	88,58	148,2		bagian diwujudkan, ditakutkan pada TW II
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kader, Program dan Kegiatan Peningkatan Ketersertaan Terhadap Partisipasi Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKute	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kader, Program dan Kegiatan Peningkatan Ketersertaan Terhadap Partisipasi Perempuan Lingkup KabupatenKute	Dokumen					1	430.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					Ditakutkan pada TW II
1.2.2	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemusatan Kemasyarakatan Perempuan Terhadap Daerah KabupatenKute	Jumlah Lembaga Layani Partisipasi Perempuan yang berkembang di KabupatenKute	lembaga	26	664.980.000	94	1.186.183.448	9	168.880.888	3	104.758.848	0	0	0	664.758.848	100	87,28	18	1.381.904.888	79,17	238,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Pemusatan Layani Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan KabupatenKute	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Pemusatan Layani Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan KabupatenKute yang mendapat Pelatihan	Orang					40	120.000.000	40	104.735.840	0	0	40	104.735.840	100	87,28					Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang dibuat, pada TW I
1.2.2.2	Peningkatan Layanan Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan KabupatenKute	Persentase Korban Kekerasan mendapat bantuan yang memenuhi syarat komusial	%	8	336.440.000	109	931.187.841	24,31	387.280.000	100	78.887.888	0	0	100	78.887.888	118,89	27,34	140	339.734.841	91	87,38	DAM dan Fisk-Gone Prodiyasa Partisipasi Perempuan dan Aksi Data diambil saat dengan pelaksanaan pada pertemuan
1.2.2.3	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Partisipasi Layani Perempuan Tingkat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan KabupatenKute (SAGG PPA)	Jumlah Layani Terselenggara Partisipasi yang mencakup koordinasi dan sinergisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan KabupatenKute	Layani					8	287.280.000	5	79.537.000	0	0	0	79.537.000	83,33	27,34					Mengapa peris kegiatan tidak terdasa, saat, s.d TW I ada 5 jenis Layanan Yang built, diberikan yaitu : Partisipasi, Pengembangan, Partisipasi, Partisipasi, Partisipasi

No	Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PO Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peringkat Daerah s.d. Rencana PO Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PO Tahun berjalan yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah s.d. Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah s.d. Tahun 2025 (%)	Unit peningkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kacamatan yang Memiliki Layanan Pused Pelayanan Keluarga (PUSPAGA)	%	100	3.343.760.000	100	8.846.882.532	100	823.838.370	100	44.368.880	0	0	0	100	44.368.880	100	8.87	100	6.081.392.402	100	238.38	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Pengapa telah ada sebanyak 8 unit yang tersebar di 5 Wilayah Kecamatan (Kec. Bal-Kot = Barata DISPUTAKAR ; Kec. Bai Tang : KANTON KEC BAL TENG dan Puskesmas Melan Sari. Kec. Bal Sari : OPSAKB dan Balai Penyuluhan KB Sebanggai ; Kecamatan BAL-UT ; Kantor WEC BAL-UT ; Kec. Bal - Tin : PUSK MANGGAR BARU ; Kec BAL- Bal ; Puskesmas Baru Tengah
1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Menyiapkan Kewenangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1.35	3.343.760.000	4.99	3.346.881.521	4	803.838.370	5.01	44.368.880	0	0	0	5.01	44.368.880	13.39	8.87	5.01	5.087.582.483	45.19	238.38	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Data Puskasul / Keluarga yang mendapatkan Pelayanan KG TW II = 1283 dibayar jumlah keluarga di Rp 238.38
1.3.1.1	Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perilaku Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kewenangan Gender (KG) dan Perilaku Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terselesaikan	Dokumen			8	883.838.370	0	44.368.880	0	0	0	0	0	0	44.368.880	0	8.87				0	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terjalin	%	41.67	848.340.000	38.34	321.438.721	38.89	168.385.180	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.81	38.34	325.938.721	31.77	82	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II
1.4.1	Pengembangan, Pengadaan, Audit dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Menanggapi Tasa di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terjalin Penyajian Data Terjalin	Jumlah	88	848.340.000	46	321.438.721	54	168.385.180	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.81	46	325.938.721	77.37	82	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Terselesaikan	Dokumen			1	168.385.180	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	2.81				0	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di TW II
1.5	PROGRAM PEMERINTAHAN HAK ANAK (PMA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	257	4.213.117.002	198	17.101.546.822	70	1.466.838.012	0	28.881.018	0	0	0	0	28.881.018	0	2.84	198	17.191.427.839	77.94	400.05	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	perhitungan dilakukan di akhir tahun
1.5.1	Pengembangan PMA pada Lembaga Pemerintah, Swasembada, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kabupaten/Kota untuk Tindak Lanjut dari hasil Evaluasi KLA dan Rekomendasi PMA yang diselesaikan	Dokumen	5	1.882.582.108	3	5.748.384.642	1	365.252.108	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	2.82	3	5.748.384.642	88	401.18	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Perhitungan dilakukan di Triwulan IV
1.5.1.1	Advokasi Kabupaten dan Pendampingan Pemerintah Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kabupaten dan Pendampingan Pemerintah Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi			30	365.252.108	5	4.500.000	0	0	0	0	0	5	4.500.000	16.87	1.23				0	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Regulasi dilakukan dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota di tahun
1.5.2	Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Persepsi, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Persepsi, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	128	2.330.568.894	81	16.418.241.790	36	1.168.778.704	0	25.381.018	0	0	0	0	25.381.018	0	2.31	81	16.443.622.799	58.83	412.88	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Regulasi akan dilaksanakan pada TW II
1.5.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Edukasi (KIE) Penerapan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Persepsi, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penerapan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Persepsi, Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1.100.778.704	0	25.381.018	0	0	0	0	0	0	25.381.018	0	2.31				0	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Dilaksanakan di Triwulan IV
1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KRISIS ANAK	Persentase Penyelesaian Pengaduan Klien pada UPTD PPA	%	71.8	5.415.336.488	88.38	29.688.787.070	70	2.222.838.180	88	168.381.720	0	0	0	88	168.381.720	127.14	7.87	88	28.774.688.790	124.48	548.82	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Data realisasi merupakan akumulasi data bulanan hingga akhir triwulan yang bersangkutan. Fluktuasi antar bulanan dipengaruhi oleh distribusi jumlah kasus kekerasan. S.d. TW I Jumlah kasus yang masuk ke UPTD PPA sebanyak 37 kasus dan yang telah selesai sebanyak 33 kasus
1.6.1	Peningkatan Kualitas Tindakan Anak yang Melibatkan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT sebagai Ragu/Ragu Perilaku Anak	%	32.48	1.791.316.180	33	4.884.881.030	38	1.078.807.180	5.14	31.883.842	0	0	0	5.14	31.883.842	87.4	5.18	36.14	4.938.384.170	169.89	354.34	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	S.d. TW I jumlah RT sebagai Ragu/Ragu Perilaku Anak sebanyak 88 RT, jumlah RT di Kota Balikpapan (PDA) : Kabupaten masih berlanjut di TW II
1.6.1.1	Advokasi dan pendampingan Peringkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan penanganan RTA	Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan penanganan RTA	Orang			250	1.070.607.180	372	33.883.842	0	0	0	0	0	372	33.883.842	148.8	3.15				0	Diras Pembudayaan Persepsi, Peningkatan Anak dan Keluarga Berencana	Akan dilakukan pelatihan target pada Ragu Perilaku Anak, kegiatan masih berlanjut di TW II

[illegible]

No	Babasan (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Indikator Kinerja Program (dokumen) Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Biaya PO Pada Mula Periode		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Pencapaian Daerah s.d. Target PO Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Biaya PO Tahun berjalan yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PO yang direvisi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Pengkaji Daerah s.d. Tahun 2025 (%)		Unit anggaran Daerah Penerimaan Jarak	Pencapaian			
				2024		2024		2024		2024		2024		2024								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.1.1.1	Advisasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jajar Formal di Sektor Pendidikan, Anggar BOKB dan SLTPM/SL, Jajar Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Admisi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jajar Formal di Sektor Pendidikan, Anggar BOKB dan SLTPM/SL, Jajar Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan			80	371.163.462	80	26.103.000					80	26.103.000	100	7.03		Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana			
2.1.1.2	Pemetaan Peta Desa Pengkaji Daerah (Peta Desa)	Pemetaan Peta Desa Pengkaji Daerah (Peta Desa)	Dokumen	3	3.276.000.000	3	21.000.000.000	3	173.470.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	100	1.00	3	21.000.000.000	34	800.71	Dokumen Desain Pengkaji Daerah (Peta Desa) dan Peta Desa
2.1.2.1	Pengkaji Data dan Informasi / Keluarga	Jumlah Data dan Informasi yang Tersedia	Dokumen			12	800.000.000	3	4.500.000					3	4.500.000	25	0.50			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.1.2.2	Pengkaji dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK-BOKB-BOKB)	Jumlah Laporan Pengkaji dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan			2	26.400.000	0	0					0	0	0	0			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.1.2.3	Pengkaji dan Pengumpulan Data Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Dokumen Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Dokumen			12	4.000.000	3	0					3	0	25	0			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.1.2.4	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Pengkaji dan Pengumpulan KB	Laporan			1	80.000.000	0	8.000.000					0	8.000.000	0	13.33			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2	PROGRAM PEMBIAYAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembiayaan KB yang masih terakumulasi (target)	% (Target Negatif)	11.2	3.172.334.871	12.20	28.874.897.802	11.20	3.212.110.889	6.7	183.264.289			6.7	183.264.289	188.28	8.28	4.7	30.162.181.217	41.88	880.82	Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana
2.2.1	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah PUS Penerima KB 2024	PUS	77980	440.554.176	71370	5.267.388.487	77980	307.880.293	10000	14.880.000	9	9	9	14.880.000	90.00	4.70	10330	2.281.188.487	90.00	488.80	Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana
2.2.1.1	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	Laporan			1	80.000.000	1	7.000.000					1	7.000.000	100	14			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2.1.2	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	Laporan			10	25.000.000	2	2.780.000					2	2.780.000	20	11.04			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2.1.3	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	Laporan			1	12.800.000	0	3.280.000					0	3.280.000	0	4.21			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2.1.4	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	Dokumen			3	140.000.000	1	0					1	0	33.33	0			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2.1.5	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	organisasi			1	35.800.000	1	1.880.000					1	1.880.000	100	0.98			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		
2.2.2	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	organisasi			170	5.544.790.807	160	7.204.877.895	34	408.888.827	6	6	6	22.880.000	6	5.70	100	1.040.877.895	60	881.84	Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana
2.2.2.1	Pengkaji dan Pengumpulan Pengkaji dan Laporan dan Pengumpulan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengkaji dan Pengumpulan KB	organisasi			12	170.210.382	0	0					0	0	0	0			Dinas Penerimaan Pengkaji, Penerimaan Aspek dan Keluarga Berencana		

[illegible]

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) (Output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Rincia PO Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Strategis Daerah s.d. Rincia PO Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Rincia PO Tahun berjalan yang direvisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia PO yang direvisasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rincia PO yang direvisasi s.d. Rincia PO Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rincia PO Periode Januari s.d. April Tahun 2025	Unit penjangkauan dan Penanggung Jawab	Pencapaian		
							I				II										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2.3.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keagamaan dan Keagamaan (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Lapangan			1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Capaian di bidang pada TW 4 dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan				
2.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Keagamaan dan Keagamaan (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Lapangan			1	600.000.000	0	12.350.000	0	0	0	12.350.000	0	2,47		Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Capaian di bidang pada TW 4 dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan			
2.3.1.3	Pengabdian Sains dan Teknologi kepada Masyarakat di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Unit Sains dan Teknologi kepada Masyarakat di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Unit			33	227.732.000	0	4.300.000	0	0	0	4.300.000	0	1,88		Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Regulasi pengabdian sains dan teknologi kepada masyarakat			
2.3.1.4	Orisasi/Pelatihan Teknis Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Keagamaan yang mendapat Orisasi/Pelatihan Teknis Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Orang			456	579.326.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Regulasi pelatihan/kegiatan keagamaan pada TW 2 dan TW 3 sesuai jadwal yang telah disusun			
2.3.1.5	Orisasi dan Pelatihan Teknis Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Laporan Hasil Orisasi dan Pelatihan Teknis Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Lapangan			8	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Regulasi pembinaan dan pengembangan keagamaan pada TW 2 dan TW 3 sesuai jadwal yang telah disusun			
2.3.1.6	Pembinaan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Jumlah Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Kelompok			20	300.291.734	0	16.865.416	0	0	0	16.865.416	0	5,54		Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Regulasi pembinaan dan pengembangan keagamaan pada TW 2 dan TW 3 sesuai jadwal yang telah disusun			
2.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	%			0	1.372.000.000	40,74	1.344.894.000	34	1.320.000.000	33	0	0	0	33,4	0	10	1.240.000.000	0	98,2
2.3.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Lapangan			1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Capaian di bidang pada TW 4 dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan keagamaan			
2.3.2.2	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan di Kecamatan Kertajaya (Majelis Daring Tawakul, Gerakan Seroakan, Kalatubasan atau Pengabdian Masyarakat Keagamaan)	Lapangan			1	1.227.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Capaian di bidang pada TW 4 dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan keagamaan			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Peringkat Daerah DP3AKB	Nilai Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah DP3AKB	Nilai	28,4	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Pengukuran indikator RB tidak dilaksanakan dengan baik akibatnya Peringkat RB No.3 Tahun 2023				
3.1	PROJEK PENJANGKUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA BALIKPAPAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Peringkat Daerah	Nilai	79	79.436.644,038	81,73	485.225.586,880	84	13.267.416,914	0	2.828.488,425	0	0	0	2.828.488,425	0	21,34	97,75	489.046.225,585	102,48	102,48
3.1.1	Peningkatan, Pengembangan, dan Penguatan Keagamaan dan Keagamaan	Nilai IKM	Nilai	84,85	10.189.840	0	0	84,85	10.189.840	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Pengukuran indikator RB tidak dilaksanakan dengan baik akibatnya Peringkat RB No.3 Tahun 2023			
3.1.1.1	Peningkatan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan	Jumlah Keagamaan dan Keagamaan	Dikumen			1	10.189.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Pengukuran indikator RB tidak dilaksanakan dengan baik akibatnya Peringkat RB No.3 Tahun 2023			
3.1.2	Administrasi Keagamaan dan Keagamaan	Nilai Layanan Administrasi Keagamaan Peringkat Daerah	Nilai	79	24.144.813,879	80,23	107.207.113,303	84	6.839.267,319	0	1.764.396,491	0	0	0	1.764.396,491	0	21,34	97,75	489.046.225,585	102,48	102,48
3.1.2.1	Peningkatan dan Pengembangan Keagamaan dan Keagamaan	Jumlah Keagamaan dan Keagamaan	Orang/ibu			602	6.839.267,319	136	2.104.886,481	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Pengukuran indikator RB tidak dilaksanakan dengan baik akibatnya Peringkat RB No.3 Tahun 2023			
3.1.3	Administrasi Keagamaan dan Keagamaan	Nilai Layanan Administrasi Keagamaan Peringkat Daerah	Nilai	79	1.317.460,923	80,16	10.189.840,000	84	1.317.460,923	0	686.394,869	0	0	0	686.394,869	0	24,34	98,25	10.189.840,000	102,48	102,48

No	Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output))	Status	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PO Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Penganggaran Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Rencana PO Tahun berjalan yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang direalisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit penyelenggara Daerah Penanggung Jawab	Pencapaian				
				B		B		B		B		B		B		B		B									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3.1	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disalurkan	Paket					18	532.496.512	4	281.270.000	0	0	0	4	281.270.000	22,22	52,82			0	4	Paket yang terdistribusi di TW 1 adalah Paket Saran komputer, Paket Komputer, Paket Alat Tulis dan Paket Perawatan personal Komputer. Pengalasan was paket dipisahkan akan disalurkan pada tahun berikutnya sesuai dengan prioritas kebutuhan kantor				
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Paket					12	436.981.388	11	116.972.400	0	0	0	11	116.972.400	91,67	27,17			0	11	Satu paket yang belum terdistribusi adalah paket pengiriman dokumen, hal ini disebabkan karena hingga akhir Tahunan I belum ada kebutuhan pengiriman dokumen yang harus disalurkan				
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Paket					3	80.999.540	2	0	0	0	0	2	0	88,67	0			0	2	Paket yang terdistribusi di TW 1 adalah (1) Paket peralatan formal administrasi pemerintahan meliputi kip surat, Amplop, dan Pengalasan was paket disalurkan di kemudian hari berikutnya yang disalurkan dengan kebutuhan kantor				
3.1.3.4	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Laporan Pengalasan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Laporan					12	572.318.308	3	81.152.588	0	0	0	3	81.152.588	25	34,49			0	3	Pencapaian Kegiatan selama 12 Bulan. Kegiatan pada TW 1 telah terdistribusi sesuai jadwal dan target yang ditetapkan				
3.1.4	Pengalasan Barang Muka Daerah Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	MR Layover Pengalasan Barang Muka Daerah Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	Muka	75	2.424.163.200	86,26	1.13.846.296.746	83	787.873.088	8	87.876.588	0	0	0	8	87.876.588	9	7,84	86,26	1.13.846.296.746	187,17	252,79	0	8	Pengalasan MR dilakukan pada akhir tahun		
3.1.4.1	Pengalasan Kenderaan Pemeringan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disalurkan	Jumlah Unit Kenderaan Pemeringan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disalurkan	Unit					8	787.873.088	8	87.876.588	0	0	0	8	87.876.588	100	7,84			0	8	Pada Tahunan I, laporan kinerja untuk indikator Jumlah Unit Kenderaan Pemeringan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disalurkan telah mencapai target sesuai rencana dengan realisasi sebanyak 8 unit atau 100% dari target yang ditetapkan. pencapaian dan pengalasan kenderaan dinas telah dilakukan sesuai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan operasional. Kenderaan 5 unit kenderaan dinas tersebut telah mendukung mobilisasi pejabat dalam pelaksanaan tugas dinas untuk menunjang aktifitas dinas secara efektif sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan				
3.1.5	Penyediaan Jasa Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	MR Layover Penyediaan Jasa Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	Muka	75	1.654.272.400	86,26	1.13.846.296.746	84	351.541.288	8	78.783.888	0	0	0	8	78.783.888	9	26,1	86,26	1.13.846.296.746	187,17	498,64	0	8	Pengalasan MR dilakukan pada akhir tahun		
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sarana Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sarana Daya Air dan Listrik yang Disalurkan	Laporan					12	74.311.200	3	1.112.200	0	0	0	3	1.112.200	25	2,3			0	3	Pengalasan ini sesuai dengan pola pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun, dimana setiap bulan dilakukan Pengalasan Jasa Komunikasi, Sarana Daya Air dan Listrik yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk laporan pemeringan. Realisasi 3 Laporan pada TW 1 tersebut mencakup laporan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret				
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disalurkan	Laporan					13	277.620.000	4	88.041.400	0	0	0	4	88.041.400	30,77	34,87			0	4	Pengalasan ini sesuai dengan pola pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Realisasi 4 Laporan pada TW 1 tersebut mencakup laporan untuk kantor untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta laporan Gaji 13 Bulan AGN				
3.1.6	Pengalasan Barang Muka Daerah Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	MR Layover Pengalasan Barang Muka Daerah Penyayang Urutan Pemeliharaan Daerah	Muka	75	1.584.262.168	86,26	1.138.597.188	83	622.291.888	8	87.437.708	0	0	0	8	87.437.708	9	11,96	86,26	1.138.597.188	187,17	16,7	0	8	Pengalasan MR dilakukan pada akhir tahun		
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rapor Pemeliharaan, dan Paket Kenderaan Pemeringan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Pemeringan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Disalurkan dan disalurkan pengalasan	Unit					58	497.636.500	19	87.437.708	0	0	0	19	87.437.708	32,76	19,58			0	19	Pemeliharaan dari pemeringan paket untuk 18 unit kenderaan dinas dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan masa berlaku paket dan kebutuhan pemeliharaan rutin berdasarkan Unit dan kenderaan lainnya, pemeliharaan dari pemeringan paket akan dilakukan secara berkala pada tahun berikutnya sesuai dengan jadwal paket kerja masing-masing unit kenderaan				

No	Sasaran (Program / Kegiatan / Subkegiatan)	Indikator Kinerja Program (output/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada AHN Periode	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perbaikan:				
							1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3.1.2.2	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	Unit			100	124.643.000	31	0	0	0	0	0	0	31	0	16,38	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan perlatan dan mesin yang disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan				
3.1.2.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit			1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Inspeksi dengan tahapan perencanaan yang telah dibuat, dimana pelaksanaan fisik pemeliharaan/rehabilitasi direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II 2025, tetapi pengesahan dan proses pengesahan, direncanakan di Triwulan II 2025				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			33,23	6,99	54,61	616		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Rendah	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			26,61	9,34				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			32,62	9,39	71,93	804,38		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			27,66	7,66	66,1	649,62		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Kolaborasi dan Sinergi mitra kerja DP3AKB (LPM,PKK,Karang Taruna,PPATBM,Forum Pusa, APSA,Pemerhati Anak,Forum Anak,Kader, Generasi Berencana,Faskes) 2. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Instansi Vertikal terkait 3.Komitmen kepemimpinan yang kuat dalam mendorong pencapaian target kinerja 4. Koordinasi dan komunikasi internal yang efektif 4. Respon cepat terhadap pengaduan masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan. 5.Tingginya minat masyarakat di Kota Balikpapan dalam pgunaan KB MKJP																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Ketergantungan pada jadwal kegiatan di tingkat provinsi yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya. 2. Rendahnya realisasi anggaran secara keseluruhan 3. Banyaknya kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga terjadi penundaan pencapaian target 4. adanya proses pergeseran pagu anggaran sebagai implementasi kebijakan efisiensi berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor : 903/0408/BKAD tentang Efisiensi dan Pergeseran anggaran 5. Belum lengkapnya proses penginputan data pendampingan keluarga berisiko stunting pada sistem link manual oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)																				
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				- Sub Keg. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepadaStakeholders dan Mitra Kerja (DAK-BOKKB-BOKB), penjelasan perlu dilengkapi - Keg. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, belum diisi penjelasan																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				Mohon untuk dapat memasukkan target kinerja kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Renja Perubahan TA 2025.																				

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Balikpapan

Disetujui di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

HERIA PRISNI

MURNI

Lampiran 7. Piagam-piagam penghargaan



Pencatat Kasus Terbaik tahun 2025



Apresiasi dalam kegiatan Pembekalan dan Pembinaan Mental Karakter



Penghargaan Bidang Pengawasan



Pencapaian Kepala DP3AKB atas Kota Layak Anak



Lomba Posyandu Tingkat Provinsi



Kota Layak Anak Peringkat Utama



Lomba Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat Nasional



Juara II Anugerah Desa Membangun Tingkat Provinsi

Lampiran 8. LHE dan Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat tahun 2025

